



# **KATALOG REFERENSI TATA RUANG DAN PENANGANAN BENCANA**

# **DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>KATALOG DALAM TERBITAN</b>	<b>4</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>5</b>
<b>Penanganan Bencana</b>	<b>6</b>
<b>Infografis</b>	<b>7</b>
<b>Jurnal</b>	<b>9</b>
<b>Ringkasan Kajian</b>	<b>54</b>
<b>Pertanahan</b>	<b>60</b>
<b>Jurnal</b>	<b>61</b>
<b>Ringkasan Kajian</b>	<b>108</b>
<b>Sistem Informasi dan Data Regional</b>	<b>110</b>
<b>Jurnal</b>	<b>111</b>
<b>Ringkasan Kajian</b>	<b>142</b>
<b>Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional</b>	<b>146</b>
<b>Buku</b>	<b>147</b>

**Jurnal**

**152**

**Ringkasan Kajian**

**212**

## KATALOG DALAM TERBITAN

Judul Buku	: Katalog Referensi Sektor Tata Ruang dan Penanganan Bencana
Pengarah	: 1. Mohammad Irfan Saleh 2. Randy Rizang Wrihatnolo 3. Suhartatik 4. Retno Ambarwati 5. Suharna
Penulis	: 1. Amalia Nur Hasanah 2. Damar Nastiti Dananjaya 3. Fara Nadhifatuz Zulfa 4. Hutomo Pangestu 5. Madinar 6. Muhammad Eka Kusuma 7. Rakha Naufal Ferdiansyah 8. Titan Andriansyah 9. Very Yanto 10. Yasinta Kurnia Kusumaningrum
Desain	: Hutomo Pangestu
Penerbit	: Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Halaman	: 216
Tahun Terbit	: 2021
Ukuran	: 14,8 cm x 21 cm

## KATA PENGANTAR

Informasi dan pengetahuan merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi atau lembaga. Pengetahuan adalah informasi yang mengubah sesuatu atau seseorang, karena informasi menjadi dasar untuk bertindak. Mengingat pentingnya informasi dan pengetahuan, serta banyaknya informasi dan pengetahuan yang tercipta di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang belum dikelola dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas yang salah satu tugas dan fungsi Pusdatinrenbang adalah pengelolaan informasi dan pengetahuan. Maka dari itu kami mencoba mengumpulkan referensi baik berupa jurnal, kajian, laporan, dan sebagainya terkait sektor Tata Ruang dan Penanganan Bencana yang merupakan salah satu sektor di Kementerian PPN/Bappenas dan disusun sebagai katalog referensi. Katalog referensi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi unit kerja dalam membuat/menyusun kajian/laporan atau *policy paper* dan sebagainya.

Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim yang berkontribusi dan memberikan ide-ide sehingga terwujudnya penyusunan katalog referensi. Tentunya katalog referensi yang kami susun, masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan katalog referensi ini

Jakarta, November 2021

Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Renbang  
Kementerian PPN/Bappenas

Mohammad Irfan Saleh

# **PENANGANAN BENCANA**

# **INFOGRAFIS**

## Strategi Manajemen Bencana di Kabupaten Magelang

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	613.6.YUN.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Public Health Symposium: Berita Kedokteran Masyarakat
<b>Pengarang</b>	Yunita Arisanti Putut Wisnu Nugroho
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Infografis
<b>Deskripsi</b>	Kabupaten Magelang termasuk daerah rawan bencana di Indonesia. Sumber bencana yang ada yaitu letusan Gunung Merapi, banjir lahar dingin, tanah longsor, dan banjir bandang. Pemerintah Kabupaten Magelang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

# JURNAL

## Analisa Kebijakan Penataan Ruang untuk Kawasan Rawan Tsunami di Wilayah Pesisir

**Kode Klasifikasi DDC**

551.4637.CBH.a

**Sektor**

Tata Ruang dan Penanganan Bencana

**Sub-Sektor**

Penanganan Bencana

**Penerbit**

Jurnal Teknologi Lingkungan

**Pengarang**

CB Herman Edyanto

**Tahun Terbit**

2011

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Penanganan pengaruh bahaya tsunami bagi masyarakat pedesaan pesisir sangat penting, dengan bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh musibah tsunami tersebut. Namun, efek bencana alam tersebut mungkin tidak terlalu sering dianalisis dan dipertimbangkan dalam beberapa proyek perencanaan tata ruang di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan data mengenai lokasi tersebut. Wilayah pesisir perlu dilindungi dari dampak tsunami dengan mempertimbangkan sejumlah besar orang yang tinggal di sana dan kegiatan yang mereka lakukan.

## Analisis dan Perancangan Sistem Pengumpulan Data Bencana Alam

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	003.THE.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Buana Informatika
<b>Pengarang</b>	Theresia Devi Indriasari Kusworo Anindito Eddy Julianto
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tindakan penanganan bencana merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data yang akurat dan cepat pada saat bencana dibutuhkan agar penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan cepat, tepat, terkoordinasi dan menyeluruh dengan instansi-instansi pemerintah yang terkait. Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan besar dalam membantu proses pengumpulan data yang akurat dan cepat.

## Analisis Kerugian Akibat Banjir di Bandar Lampung

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	363.34936.DAR.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Teknik Sipil
<b>Pengarang</b>	Darwansyah Sesunan
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Masalah banjir dihadapi hampir di seluruh negara di seluruh dunia. Berbagai studi juga telah dilakukan untuk menangani banjir tersebut, namun realisasinya selama ini hanya dilakukan secara parsial. Dan kejadian banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat yang mengakibatkan kerugian jiwa, harta dan benda. Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkan. Karena datangnya relatif cepat, untuk mengurangi kerugian akibat bencana tersebut perlu dipersiapkan penanganan secara cepat, tepat dan terpadu.

## **Analisis Model Manajemen Teknologi Komunikasi Terpadu yang Digunakan Jajaran Pemerintah Provinsi DIY dalam Mendukung Operasional Pemerintahan dan Penanganan Bencana Alam**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.EDW.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu Komunikasi
<b>Pengarang</b>	Edwi Arief Sosiawan Arif Rianto Budi Nugroho Susilastuti D.N.
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi secara mendalam fenomena penggunaan dan pemanfaatan jaringan teknologi komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dengan rumusan masalah “Bagaimana model manajemen teknologi komunikasi terpadu yang digunakan jajaran Pemerintah Provinsi DIY dalam mendukung operasional pemerintahan dan penanganan bencana alam?”.

## **Analisis Sistem Drainase Kota Semarang Berbasis Sistem Informasi Geografi dalam Membantu Pengambilan Keputusan bagi Penanganan Banjir**

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	631.6.THD.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK
<b>Pengarang</b>	Th. Dwiati Wismarini Dewi Handayani Untari Ningsih
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sistem drainase perkotaan merupakan salah satu komponen prasarana perkotaan yang sangat erat kaitannya dengan penataan ruang. Bencana banjir yang sering melanda sebagian besar wilayah dan kota di Indonesia disebabkan oleh kesemrawutan penataan ruang. Analisis ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografi dan ketersediaan data digital untuk kawasan regional atau skala global.

## **Aplikasi *Mobile* Penanganan Bencana dan Keadaan Darurat Berbasis Prosedur dan Objek Pendukung**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.5.FIT.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Data Manajemen dan Teknologi Informasi (DASI)
<b>Pengarang</b>	Fitriansyah Silmi Fauziati T. Bharata Adji
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Bencana dan keadaan darurat yang mengakibatkan kerugian jiwa dan material yang banyak sangat perlu penanganan yang bersifat menyeluruh dan terkoordinir. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar semua pihak yang terlibat dapat dengan cepat dilakukan dengan bantuan teknologi dan aplikasi <i>mobile</i> . Aplikasi <i>mobile</i> dapat membantu permasalahan manajemen penanganan bencana dan keadaan darurat.

## Arahan Penanganan Kawasan Rawan Banjir Berbasis GIS (*Geography Information System*) di Kecamatan Tamalate Kota Makassar

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	627.4.NUR.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
<b>Pengarang</b>	Nur Syam As
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kota Makassar. Penentuan langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah banjir dapat dibantu dengan pemetaan kerentanan banjir. Daerah studi kasus dalam penelitian ini adalah Kecamatan Tamalate Kota Makassar sebagai salah satu daerah yang rawan banjir di Kota Makassar. Penelitian difokuskan pada zonasi daerah rawan banjir berdasarkan tingkat kerawanan banjir untuk arahan penanganan kawasan rawan banjir. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

## Arahan Pengendalian Banjir Berbasis GIS di Kecamatan Sinjai Utara Kab. Sinjai

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	627.4.NUR.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
<b>Pengarang</b>	Nur Afni
<b>Tahun Terbit</b>	-
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi kawasan berdasarkan tingkat kerentanan banjir di Kecamatan Sinjai Utara serta merumuskan arahan pengendalian pemanfaatan lahan berdasarkan tingkat kerentanan banjir Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana tata ruang terhadap pengendalian pemanfaatan ruang dan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi pemerintah terhadap penanganan dalam rangka meminimalkan dampak bencana banjir, pada kawasan-kawasan yang rawan terhadap banjir.</p>

**Best (*Bracelet Self-Triage*) Gelang Berbasis Mikrokontroler Berteknologi Sensor Nadi dan Tekanan Darah sebagai Inovasi Pendeteksi Triase pada Korban Bencana**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	608.DEW.b
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	BIMIKI (Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia)
<b>Pengarang</b>	Dewi Resti Nazully Qiran Asih Hutami Rudy Arsinta Nanda Ayu Susanti
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Dalam penanggulangan bencana, penanganan kegawatdaruratan diawali dengan mengidentifikasi secara cepat korban berdasarkan kondisi medisnya, untuk kemudian dapat menentukan triase. Gagasan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan metode triase dalam penanggulangan bencana dengan sebuah alat bernama BEST ( <i>Bracelet Self-Triage</i> ) yang dapat mendeteksi nadi dan tekanan darah sehingga dapat mengidentifikasi syok pada korban bencana, yang akan menentukan triase korban.

## Dakwah pada Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	2X7.2.WEN.d
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu Dakwah
<b>Pengarang</b>	Wening Wihartati
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Bencana merupakan kejadian yang mengganggu keadaan dalam kondisi normal dan mengakibatkan penderitaan yang melampaui kapasitas penyesuaian individu atau komunitas yang mengalaminya. Bencana terdiri dari dua jenis yaitu: bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh manusia. Dampak bencana ini membawa akibat secara psikologis dan trauma yang sangat mendalam yang membutuhkan penanganan. <i>Mad'u</i> penanganan bencana ini dapat dikatakan <i>mad'u</i> dengan kebutuhan khusus karena kondisi psikologis yang diderita memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi kehidupan yang harus dijalani.</p>

## Dampak Bencana Lahar Dingin pada Perubahan Strategi Penghidupan Masyarakat Desa Sirahan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	552.2.LIS.d
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Bumi Indonesia
<b>Pengarang</b>	Lisa Okta Kharisma H. B.S. Eko Prakoso
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi perubahan kondisi aset, akses, aktivitas masyarakat setelah terjadi bencana lahar dingin di Desa Sirahan, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, mengkaji perubahan strategi penghidupan masyarakat setelah terjadi bencana lahar dingin, membuat arahan penanganan korban pascabencana lahar dingin dalam memulihkan kehidupan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, <i>in-depth interview</i> , dan data sekunder.

## Efektivitas dan Efisiensi Peran Pemerintah dalam Tanggap Darurat Banjir di Kabupaten Sragen

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	627.4.AUL.e
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Teknik PWK
<b>Pengarang</b>	Aulia Nuriasari Jawoto Sih Setyono
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Salah satu dampak perubahan iklim adalah terjadinya bencana banjir di beberapa Daerah Aliran Sungai seperti di DAS Bengawan Solo yang merupakan DAS terpanjang di Pulau Jawa. Kabupaten Sragen sebagai bagian dari DAS Bengawan Solo hulu hampir tiap tahunnya mengalami bencana banjir.

**Evaluasi Kesesuaian Salinitas Air untuk Pemukiman setelah Sepuluh Tahun Tsunami di Banda Aceh, Indonesia**  
***(Water Salinity Evaluation Suitability for Settlement after Ten Year Tsunami in Banda Aceh, Indonesia)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	551.4637.MUH.e
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Acta Aquatica: Aquatic Sciences Journal
<b>Pengarang</b>	Muhammad Rusdi Ruhizal Roosli Mohd Sanusi S. Ahamad
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Banda Aceh adalah daerah pemukiman yang paling parah terkena dampak gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004. Baru-baru ini, sepuluh tahun setelah kejadian tersebut banyak pemukiman yang dibangun kembali. Sebagai daerah rawan bencana, evaluasi terhadap kadar salinitas pada basis kawasan pemukiman di Banda Aceh perlu dievaluasi.

## Gerakan Sosial Tanggap Bencana (Studi Kasus Pola Gerakan Sosial Kelompok SIBAT, MTB dan Tanggul Bencana GKJW di Desa Sitarjo)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	361.8.IMA.g
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Mahasiswa Sosiologi
<b>Pengarang</b>	Imam Mahmudin Badawi
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Gerakan sosial kelompok masyarakat terbentuk dari kesadaran dan kepedulian terhadap bencana menjadi kajian penulis. Dalam kerangka teori, penulis menggunakan teori struktur mobilisasi sumber daya dan proses <i>framing</i> pada gerakan sosial oleh John D McCarthy dan Mayer N. Zald. Struktur mobilisasi sumber daya terdiri dari adanya tindakan kolektif dan peran kelompok dalam gerakan sosial. Proses <i>framing</i> melalui tiga tipe yaitu adanya kontradiksi budaya, aktivitas strategi dan pengkontesan. Metode yang digunakan adalah kualitatif eksplanasi dengan pendekatan studi kasus, serta teknik analisis data yang penulis gunakan adalah penjudohan pola.

**Kajian Dampak Erupsi Merapi terhadap Perubahan Penghidupan Masyarakat Tani Desa Ngargomulyo untuk Pengembangan Konsep *Sister Village* dalam Manajemen Bencana**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	551.21.DIW.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Bumi Indonesia
<b>Pengarang</b>	Diwya Safitri Alia Fajarwati
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Bencana erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 menyebabkan dampak baik secara fisik maupun tata sosial ekonomi masyarakat Desa Ngargomulyo. Adanya perubahan aktivitas pascabencana menjadi perangsang masyarakat lokal untuk melakukan <i>recovery</i> secara mandiri dan sebagai strategi masyarakat untuk meningkatkan penghidupan mereka menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak bencana erupsi Merapi tahun 2010 terhadap perubahan penghidupan masyarakat tani Desa Ngargomulyo.

## Kajian Penanganan Banjir Sungai Tuntang di Desa Pulosari Kabupaten Demak

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	627.4.AMY.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Karya Teknik Sipil
<b>Pengarang</b>	Amylian Rizkiana Safitri Alfiansyah Deviar Suharyanto dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Banjir adalah luapan air yang melebihi kapasitas penampang atau melewati batas elevasi rencana sungai akibat curah hujan yang tinggi. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang mempunyai dampak besar bagi kelangsungan hidup manusia. Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan banjir yang terjadi di Kabupaten Demak antara lain disebabkan karena meluapnya salah satu sungai yaitu Sungai Tuntang.

## Kajian Penanganan Dampak Penambangan Pasir Besi terhadap Lingkungan Fisik Pantai Ketawang Kabupaten Purworejo

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	622.8.JOS.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Teknik PWK
<b>Pengarang</b>	Jospeh Y A Dara Agung Sugiri
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pesisir menjadi wilayah yang sangat berarti bagi kehidupan manusia karena wilayah pesisir merupakan kawasan strategis. Sehingga kawasan industri juga banyak di wilayah pesisir Purworejo. Desa Ketawangrejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Grabag yang memiliki wilayah pesisir di mana PT. Antam beroperasi. Permasalahan yang merupakan dampak negatif dari penambangan pasir besi wilayah pesisir Purworejo adalah musnahnya gumuk dari topografi khas pesisir yang unik, kerusakan permanen pada bekas areal yang ditambang, dan banjir <i>rob</i> .

## Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dalam Penanganan Korban Bencana

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	613.6.ISM.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Keperawatan Soedirman (The Soedirman Journal of Nursing)
<b>Pengarang</b>	Ismunandar
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sulawesi Tengah telah terjadi 3 kali bencana yakni gempa bumi, kerusuhan dan banjir bandang yang menyebabkan adanya korban jiwa. Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Undata Palu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan dalam penelitian ini adalah anggota Tim Penanggulangan Bencana RSUD Undata Palu.

### ***Local Wisdom and Natural Disaster in West Sumatra***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	363.3495.SYA.I
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	el Harakah
<b>Pengarang</b>	Syafwan Rozi
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Managemen bencana berbasis masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi sosial dan nilai-nilai lokal yang dimiliki masyarakat untuk memudahkan proses penanganan bencana alam. Sumatera Barat sebagai salah satu daerah rawan bencana di Indonesia, memiliki sejumlah nilai kearifan lokal, sebuah nilai yang memadukan antara agama dan budaya lokal yang termaktub dalam filosofi adat; Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Di antara kearifan lokal itu adalah ide atau pepatah adat dalam bentuk tambo dan ungkapan-ungkapan, tata ruang rumah adat dari segi arsitektur rumah gadang.</p>

## Menghindari Pseudo Informasi dalam Sistem Informasi Kebencanaan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.ILH.m
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Komunikatif: Jurnal Jurnal Ilmiah Komunikasi
<b>Pengarang</b>	Ilham Gemiharto
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Konsep pseudo informasi berasal dari pemikiran Terence Moran (1978), seorang profesor dalam bidang ekologi media mengenai pseudo komunikasi. Moran menyatakan bahwa pseudo komunikasi bersumber dari adanya pseudo informasi yang dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya dalam bentuk propaganda. Kini dengan maraknya media sosial, pseudo informasi juga ditemukan dalam berbagai bentuk dan sering kali muncul dalam berbagai kesempatan, misalnya pada masa darurat kebencanaan.

**Model Ideal Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Mendukung Operasional Penanganan Bencana Alam**  
*(The Ideal Model of Information Technology and Communication Management to Support Natural Disasters Management)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.EDW.m
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)
<b>Pengarang</b>	Edwi Arief Sosiawan
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Model ideal manajemen TIK dalam operasional penanggulangan bencana mensyaratkan adanya penambahan Bagian Urusan Teknologi dalam struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Bagian ini nantinya akan memiliki dua seksi, yakni Seksi Operasional Administrasi dan Seksi Operasional Lapangan. Penelitian ini bermaksud untuk membuktikan efektivitas model tersebut melalui pendekatan deskriptif kualitatif.

## Model Manajemen Teknologi Komunikasi dalam Pemerintahan dan Penanganan Bencana Alam

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.EDW.m
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu Komunikasi
<b>Pengarang</b>	Edwi Arief Sosiawan Arif Rianto Budi Nugroho Susilastuti D.N.
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pemerintah daerah yang diteliti yaitu Pemkab Sleman, Pemkab Bantul dan Pemkot Yogyakarta yang secara kelembagaan memiliki perbedaan dalam pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Ketiga lembaga pengelola bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, namun kewenangan dalam menentukan kebijakan sangat berbeda. Pada sisi lain, adanya perbedaan pengelolaan TIK terlihat kurangnya standardisasi dalam manajemen.

## Pemberdayaan Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penanganan Bencana Gempa Bumi di Yogyakarta (Kasus Kabupaten Bantul)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	363.3495.MBA.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Komunikasi Pembangunan
<b>Pengarang</b>	M. Badri M. Hubeis Maksum
<b>Tahun Terbit</b>	2008
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan komunikasi bagi para pemuka pendapat dalam penanganan pascabencana gempa bumi Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul. Analisis dilakukan untuk mengetahui karakteristik pribadi pemuka pendapat, perilaku komunikasi pemuka pendapat, kelompok masyarakat, pemberdayaan komunikasi pemuka pendapat dalam penanganan pascabencana serta pengaruh karakteristik pribadi pemuka pendapat, perilaku komunikasi pemuka pendapat.

## **Pemodelan dan Simulasi Pedestrian untuk Evakuasi Bencana pada Kawasan *Boulevard* Manado Menggunakan Model *Cellular Automata***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	003.3.WIL.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	E-journal Teknik Informatika
<b>Pengarang</b>	William Dave Wenno Steven R. Sentinuwo Alwin M. Sambul
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Melakukan evakuasi bencana pada Kawasan <i>Boulevard</i> memerlukan penanganan yang tepat. Kawasan <i>Boulevard</i> merupakan salah satu kawasan unggulan di Kota Manado. Menjadi pusat perbelanjaan dan hiburan di Kota Manado, membuat kawasan ini cukup padat pengunjung.

## Penanganan Anak dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	613.6.MUL.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Dakwah
<b>Pengarang</b>	M Ulil Absor
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kajian tentang penanganan anak dalam masa tanggap darurat sangat jarang dilakukan. Kajian ini akan mencoba mengkaji salah satu pendekatan dalam memberikan layanan kepada anak-anak yang menjadi korban bencana alam yaitu pendekatan berbasis hak. Kajian ini akan memberikan landasan konseptual dan teoritis dalam merancang dan melaksanakan program penanganan anak.

**Penanganan Dampak Sosial Psikologis Korban Bencana Merapi**  
*(Social Impact of Psychological Treatment Merapi Disaster Victims)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	613.6.CHA.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Informasi
<b>Pengarang</b>	Chatarina Rusmiyati Enny Hikmawati
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Hidup di tempat pengungsian yang penuh dengan keterbatasan sering menimbulkan ketidakpastian sampai kapan mereka akan tinggal. Hal ini berkaitan pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan pengganti tempat tinggal yang permanen, di samping kemampuan dari korban bencana itu sendiri. Lokasi pengungsian kurang memadai ditinjau dari kepadatan hunian, asupan gizi, sarana MCK, sanitasi lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kondisi ini dapat menyebabkan pengungsi terutama anak-anak dan lansia rawan terhadap penyakit.

## Penanganan Permukiman Rawan Banjir di Bantaran Sungai (Studi Kasus: Permukiman Kuala Jengki di Kelurahan Komo Luar & Karame, Kota Manado )

**Kode Klasifikasi DDC**

627.4.WIN.p

**Sektor**

Tata Ruang dan Penanganan Bencana

**Sub-Sektor**

Penanganan Bencana

**Penerbit**

Jurnal Ilmiah Media Engineering

**Pengarang**

Windy J. Mononimbar

**Tahun Terbit**

2014

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Kota Manado merupakan salah satu kota di Indonesia yang rawan bencana banjir. Berdasarkan riwayatnya, banjir yang terjadi 15 Januari 2014 merupakan banjir paling parah karena menggenangi hampir seluruh wilayah kota serta menelan korban jiwa dan materi yang sangat besar. Terdapat dua kawasan di Kota Manado yang menjadi langganan banjir setiap tahun yakni Kelurahan Komo Luar dan Kelurahan Karame, sehingga oleh Dinas PU Provinsi Sulut ditetapkan sebagai kawasan sangat rawan banjir. Hal ini disebabkan kedua kelurahan tersebut terletak di area bantaran Sungai Tondano yang sering disebut Kuala Jengki, dengan kondisi topografi cukup rendah (dataran/landai).

## Pengelompokan Data dengan Menggunakan Metode *Fuzzy C-Means* untuk Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	551.302.FAI.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Syntax Admiration
<b>Pengarang</b>	Faisal Akbar
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kabupaten Kuningan salah satu daerah dengan lokasi dataran yang secara geografis merupakan daerah yang memiliki permukaan tanah relatif datar dengan variasi berbukit-bukit menyebabkan beberapa wilayah di Kabupaten Kuningan sangat rawan terjadinya longsor saat musim hujan. Dalam penanganan prabencana di wilayah tersebut, pemerintah dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Kuningan melakukan mitigasi bencana yang bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya longsor.</p>

## Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) pada Platform Google untuk Penanggulangan Kebakaran di Jakarta Selatan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.EDY.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2011 (SNATI 2011)
<b>Pengarang</b>	Edy Irwansyah Sena Adhinugraha Tri Datara Wijaya
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk pengembangan sistem informasi geografis pada platform google mengenai letak posisi daerah rawan kebakaran di wilayah Jakarta Selatan beserta titik-titik pendukung penanggulangan dan juga sebagai alat analisis untuk pengembangan dan penambahan komponen pendukung dalam penanganan dan penanggulangan bencana kebakaran. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi <i>waterfall model</i> .

## Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Korban Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Ternate

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.ABD.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmiah ILKOMINFO-Ilmu Komputer & Informatika
<b>Pengarang</b>	Abdul Syah Lamahamu Subhan
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate merupakan sebuah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk membantu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu. Saat ini BPBD dalam melaksanakan proses pendataan korban bencana masih lambat yang disebabkan karena masih memprosesnya secara manual. Dalam melakukan proses pendataan di setiap posko pengungsi kemungkinan masih terjadinya kesulitan antara lain, perhitungan yang kurang akurat dan waktu yang cukup lama dalam pengolahan data.

## Perancangan Sistem Koordinasi Relawan dalam Penanggulangan Bencana Menggunakan GIS dan *Agent Based Modeling (ABM)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	003.3.FAU.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri (PASTI)
<b>Pengarang</b>	Fauzi Khair
<b>Tahun Terbit</b>	-
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Fase respon atau fase tanggap darurat merupakan fase penting dalam penanggulangan bencana. Fase ini membutuhkan suatu sistem koordinasi relawan dan sistem yang terintegritasi dengan baik dalam pengelolaannya. Setiap kesalahan dalam sistem pada fase ini akan berimbas pada peningkatan signifikan dari jumlah korban maupun kerugian materiil yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem koordinasi sentralisasi dan desentralisasi penanggulangan bencana erupsi Merapi. Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan <i>Agent Based Modeling (ABM)</i> dan <i>Geographic Information System (GIS)</i> .

**Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh**  
*(People Perception on the Government's Policy in Handling the Catastrophe of Forest and Land Fires in Bukit Tiga Puluh National Parks Area)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	634.96.ROB.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jom Faperta UR
<b>Pengarang</b>	Robby Wirianto M. Mardhiansyah Evi Sri Budiani
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) merupakan kawasan pelestarian alam yang pengelolaannya dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di sekitarnya. Persepsi masyarakat dapat diidentikkan dengan tanggapan individu terhadap sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakan di lingkungannya. Kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi setiap tahun. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan adalah dengan mengeluarkan kebijakan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan.

## Prinsip Interkoneksi Informasi dalam Penanganan Bencana Banjir

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.DIC.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Sositoteknologi
<b>Pengarang</b>	Dicky R. Munaf
<b>Tahun Terbit</b>	2007
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Dikarenakan karakteristik geografisnya, bencana alam di Indonesia tidak dapat dihindari. Namun, masalah tersebut dapat diantisipasi dengan pengalaman empiris dan pengetahuan tradisional. Jurnal ini membahas interkoneksi kedua faktor tersebut sehingga hal tersebut akan melahirkan <i>early warning culture</i> di Indonesia.

**Prototipe Penanganan Bencana Bidang Kesehatan Berdasarkan *Lesson Learned* di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Kabupaten Nias dan Kabupaten Alor**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	613.6.SKP.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Buletin Penelitian Sistem Kesehatan
<b>Pengarang</b>	SK Poerwani Siswanto Evie Sopacua dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2007
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Bencana adalah kejadian yang dapat dihindari meskipun secara alamiah. Namun jika itu terjadi, ada kegiatan luar biasa yang harus dikelola sebagai keadaan darurat. Bencana yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam, Nias dan Alor merupakan pembelajaran bersama bahwa dalam mekanisme tanggap darurat kesehatan ada hal-hal yang dapat diantisipasi. Mobilisasi sumber termasuk tenaga kesehatan dapat dilakukan oleh provinsi, kabupaten atau kota yang terdekat dengan daerah bencana.

## ***Quo Anima dan Quovadis Kebijakan Penanganan Konflik di Indonesia***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.405.RIZ.q
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Academica
<b>Pengarang</b>	Rizali Djaelangkara
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama dan budaya menuju proses Indonesia yang utuh, di mana dalam proses tersebut berdasarkan sejarah perjuangan, pembentukan dan pembangunan bangsa Indonesia, potensi konflik selalu ada, baik yang bersifat laten maupun berwujud, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Ancaman potensi konflik tersebut bukan sesuatu bahaya yang signifikan jika dalam penanganannya terlembagakan dalam kerangka kebijakan yang lebih tinggi yang dapat menjadi payung bagi kerangka kebijakan dan operasional di bawahnya bagi semua sektor, tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait.

## Sekolah Petra (Penanganan Trauma) bagi Anak Korban Bencana Alam

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	613.6.DWI.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmiah Mahasiswa
<b>Pengarang</b>	Dwi Utari Nugroho Nurulia Unggul P.R Nur Shinta Rengganis dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kurangnya perhatian pada penanganan korban bencana alam, khususnya upaya pemulihan trauma di setiap bencana alam yang terjadi di Indonesia merupakan masalah yang belum ditangani secara serius dan efektif. Padahal trauma dapat menyebabkan masalah besar dalam kehidupan pascabencana alam. Bencana berarti juga terhambatnya laju pembangunan. Berbagai hasil pembangunan ikut menjadi korban sehingga perlu adanya proses membangun ulang. Siswa pun harus terpaksa berhenti sekolah.

## Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Tanah Longsor di Kabupaten Gunung Kidul Berbasis *Web*

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	005.36.SAR.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Sarjana Teknik Informatika
<b>Pengarang</b>	Sari Mulyaningsih Tedy Setiadi
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Kesbangpolinmasbena) berwenang dalam upaya penanganan bencana alam terutama bencana tanah longsor dan sistem penanggulangannya. Badan ini mengalami kesulitan dalam menganalisa serta penyampaian informasi untuk memetakan daerah rawan tanah longsor karena selama ini masih menggunakan peta konvensional sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kekurangan dari peta konvensional yaitu sulit dalam meng- <i>update</i> serta memiliki risiko kerusakan dan kehilangan data.

## Sosialisasi dan Pelatihan Kesiapsiagaan Kebakaran di Permukiman

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	628.9.WID.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Abdimas Universal
<b>Pengarang</b>	Widya Mulya
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan pertumbuhan permukiman semakin padat. Kebakaran merupakan salah satu bencana nonalam yang biasanya terjadi di daerah perumahan atau di daerah permukiman padat penduduk. Pemerintah Kota Balikpapan mencatat pada tahun 2015 terdapat 46 kejadian kebakaran, pada tahun 2016 terdapat 35 kejadian kebakaran. Pada Kelurahan Gunung Sari Ulu Kota Balikpapan, pernah terjadi kebakaran pada tahun 2013 di RT 66 dan RT 69 (Kaltim.tribunnews.com).

## Sosialisasi Tanggap Bencana pada Masyarakat Melalui Pendekatan Literasi Media di Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	613.6.ISK.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Journal of Character Education Society
<b>Pengarang</b>	Iskandar Amin Saleh Iwin Ardyawin dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sosialisasi Tanggap Bencana pada Masyarakat di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Melalui Pendekatan Literasi Media Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengamalan <i>Chatur Dharma</i> Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian pada masyarakat dalam merespon isu kebencanaan yang berhubungan dengan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan literasi media.

## Strategi Penanganan Kebencanaan di Kota Semarang (Studi Banjir dan *Rob*)

**Kode Klasifikasi DDC**

613.6.INN.

**Sektor**

Tata Ruang dan Penanganan Bencana

**Sub-Sektor**

Penanganan Bencana

**Penerbit**

Journal of Public Policy and Management Review

**Pengarang**

Inne Septiana Permatasari

**Tahun Terbit**

2012

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan bencana. Bencana mengakibatkan penderitaan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun nonalam. Bencana yang sangat menonjol di Kota Semarang adalah banjir dan *rob*. Fokus dan tujuan penelitian ini adalah bagaimana strategi yang telah ada di Rencana Strategi (Renstra) guna pencapaian penanganan banjir dan *rob* di Kota Semarang. Menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) dalam analisis lingkungan strategis yang ada dalam penanganan banjir dan *rob*. Setelah isu-isu dalam lingkungan strategis diketahui, selanjutnya diuji dengan *litmustest*.

## Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	577.53.DAD.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
<b>Pengarang</b>	Dadan Mukhsin
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Gunung Galunggung merupakan wisata di Kecamatan Sukaratu, yang memiliki pertumbuhan dan kegiatan pembangunan untuk rekreasi dan pembangunan untuk pelayanan. Gunung Galunggung memiliki dualisme fungsi yaitu (1) sebagai kawasan pariwisata, serta (2) sebagai kawasan lindung bagi wilayah yang berada di bawahnya. Berdasarkan hal tersebut, Gunung Galunggung sebagai bagian dari kawasan yang menawarkan objek wisata alami yang sekaligus memiliki fungsi lindung terhadap kawasan di bawahnya tentu membutuhkan penanganan khusus dalam pengembangannya.

## Studi Penanganan Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Pontolo

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	627.4.APR.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa dan Teknologi
<b>Pengarang</b>	Apriani
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Kondisi saat ini begitu banyak permasalahan, terutama di kawasan pemukiman selaras dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dan modern, serta memerlukan rasa aman terhadap bahaya banjir atau genangan air yang selalu mengancam pada tiap tahun musim penghujan datang khususnya di Kec. Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana banjir yang terjadi di Desa Pontolo, yaitu dengan membuat tanggul penampung air, sistem sumur resapan yang terhubung dengan sistem drainase, membuang sampah pada tempatnya, dan membersihkan saluran.</p>

## **Traumatic Healing bagi Anak-Anak Korban Bencana Gempa Bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	613.6.ATR.t
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Jurnal Abdi Mas TPB
<b>Pengarang</b>	Atri Dewi Aziz Ansar
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Setelah gempa bumi mengguncang Pulau Lombok pada tanggal 29 Juli 2018 dengan <i>magnitude</i> 6,4 SR masyarakat mengalami depresi dan trauma yang sangat dahsyat, sehingga membutuhkan <i>traumatic healing</i> yang diharapkan dapat menyembuhkan mental bagi korban bencana. Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini adalah melakukan penanganan trauma ( <i>traumatic healing</i> ) bagi korban bencana khususnya anak-anak usia dini. Penanganan <i>traumatic healing</i> memiliki empat titik poin, yaitu fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Karena keempat titik poin tersebut merupakan prinsip keseimbangan dalam hidup manusia.

## Urgensi Undang-Undang Penanggulangan Bencana di Indonesia

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	348.598.HER.u
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Lex Journalica
<b>Pengarang</b>	Heru Susetyo
<b>Tahun Terbit</b>	2005
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Musibah gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara, 26 Desember 2004 silam adalah suatu momentum berharga bagi pemerintah dan bangsa Indonesia. Nyata betul bahwa negara ini begitu tidak berdaya menghadapi musibah tersebut. Mayat-mayat bergeletakkan, bantuan kemanusiaan menumpuk dan penyebarannya pun tidak merata, pengungsi terus lapar dan menderita berbagai macam penyakit.

# **RINGKASAN KAJIAN**

**Analisis Kualitas Implementasi Protokol Banjir Pemerintah Daerah DKI Jakarta (Studi Kasus: Banjir Bukit Duri, Jakarta)**  
***(Quality Analysis Implementation Jakarta Local Government Flood Protocol (Case Study: Flood in Bukit Duri, Jakarta))***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	627.4.HAS.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Doctoral dissertation, Bakrie University
<b>Pengarang</b>	Hasan Hasbulah
<b>Tahun Terbit</b>	-
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Bencana banjir yang terjadi di DKI Jakarta bukanlah bencana banjir biasa, karena hampir tiap tahun banjir terus menaungi Kota Jakarta, dan salah satu daerah yang mengalami kerusakan terparah akibat adanya banjir Jakarta adalah Kelurahan Bukit Duri. Banjir mengakibatkan berbagai dampak baik dampak langsung maupun tidak langsung seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi protokol banjir Pemerintah Daerah DKI Jakarta di Kelurahan Bukit Duri menurut protokol banjir Dublin.

## Aplikasi Mobile Doctor untuk Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Layanan Medis dalam Penanggulangan Bencana Alam

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.5.GAT.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Seminar Nasional Informatika 2011 (semnasIF 2011)
<b>Pengarang</b>	Gatot Santoso Edhy Sutanta Samekto Wibowo
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Peranan IPTEK dalam antisipasi dan penanganan bencana alam sangatlah besar. Perkembangan TIK memberikan terobosan baru dalam layanan kesehatan <i>mobile</i> dengan memanfaatkan perangkat TI genggam atau yang biasa disebut dengan mobile doctor. Mobile doctor memiliki beberapa kelebihan kemampuan untuk penanganan bencana yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Sistem ini, akan memungkinkan dokter untuk memantau dari jauh seorang pasien korban bencana yang dapat bebas bergerak.

## Aplikasi Penentuan Status Gunung Berapi Menggunakan Telemetry Suhu

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.5.FRA.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Seminar Nasional Informatika 2009 (semnasIF 2009)
<b>Pengarang</b>	Frans Richard Kodong
<b>Tahun Terbit</b>	2009
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Sistem Modern Peringatan Dini ( <i>Early Warning System</i> ) Gunung Berapi sudah sejak 1999 diterapkan pada beberapa gunung berapi di Indonesia. Teknologi yang digunakan dalam pemantauan gunung berapi menerapkan teknologi satelit dan disebarkan ke seluruh dunia termasuk Direktorat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi yang terletak di Bandung. Peningkatan aktivitas gunung berapi dapat dilihat dari frekuensi gempa, naiknya kadar belerang, membesarnya perut gunung, perubahan kemiringan lereng, salah satu parameter yang terpenting adalah suhu kawah gunung berapi.

## **Optimasi *Protocol Open Shortest Path First* pada *Disaster Recovery Data Center***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	621.382.RIJ.o
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Seminar Nasional Informatika 2011 (semnasIF 2011)
<b>Pengarang</b>	Rijal Fadhilah Djumhadi
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	<i>Data center</i> pada infrastruktur jaringan komputer dan komunikasi data yang diterapkan di bidang industri baik jasa maupun barang memiliki peran vital sekaligus strategis untuk menentukan keberlanjutan proses produksi. Salah satu bentuk ancaman yang mungkin saja terjadi dan mengganggu keberlanjutan proses produksi tersebut bisa disebabkan oleh bencana alam. Sehingga untuk menjamin keberlanjutan proses produksi tersebut perlu upaya penanganan yang komprehensif terhadap <i>data center</i> baik sebelum, sedang maupun setelah terjadi bencana alam.

## Sistem Informasi Multiancamam Bencana Alam di Aceh

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.NAS.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Penanganan Bencana
<b>Penerbit</b>	Seminar Nasional Informatika 2011 (semnasIF 2011)
<b>Pengarang</b>	Nasaruddin Khairul Munadi Dedi Yuliansyah
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Provinsi Aceh mengalami banyak ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004, banjir yang melanda beberapa daerah kabupaten, gunung merapi dan lain-lain. Bencana-bencana tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap manusia, lingkungan dan ekonomi di Aceh. Pemerintah Aceh belum punya sistem informasi ancaman alam yang dapat digunakan sebagai <i>tool</i> pendukung keputusan dan untuk meningkatkan kesadaran publik dalam upaya pengurangan dampak dari ancaman tersebut.

# **PERTANAHAN**

**JURNAL**

## Akibat Hukum Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan di Kota Batam

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.1.ISD.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
<b>Pengarang</b>	Isdian Anggraeny Muhammad Bakri Jazim Hamidi
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Konflik pertanahan di Kota Batam terjadi di beberapa wilayah Kota Batam yang pada awalnya bukan kawasan hutan diidentifikasi sebagai kawasan hutan oleh SK.463/Menhut-II/2013, seperti: Tanjung Uncang, Tanjung Gudap, Batuampar, Batam Center, dan Batuaji. Dengan adanya konflik pertanahan tersebut menggambarkan adanya insinkronisasi pengaturan bidang pertanahan dengan SK.463/Menhut-II/2013 yang berakibat pada status hak pengelolaan.

## Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan

**Kode Klasifikasi DDC**

333.3.MUD.a

**Sektor**

Tata Ruang dan Penanganan Bencana

**Sub-Sektor**

Pertanahan

**Penerbit**

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM

**Pengarang**

Mudjiono

**Tahun Terbit**

2007

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Tanah merupakan aset yang sangat berharga. Bagi sebuah bangsa, tanah memegang peranan penting yang mampu menunjukkan kedaulatan bangsa yang bersangkutan. Pengambilalihan tanah oleh bangsa lain akibat penjajahan serta banyaknya konflik pertanahan yang timbul di dalam negeri akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik dari negara yang bersangkutan. Ketersediaan tanah yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan manusia. Inilah yang memicu timbulnya konflik pertanahan. Di Indonesia, sengketa pertanahan yang ada diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Analisa Ketelitian Planimetris Citra *Quickbird* Guna Menunjang Kegiatan Administrasi Pertanahan (Studi Kasus: Kabupaten Gresik, 7 Desa Prona)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.5.THE.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Teknik ITS
<b>Pengarang</b>	Theo Prastomo Soedarmodjo Agung Budi Cahyono Dwi Budi Martono
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pembuatan peta dasar dalam menunjang kegiatan administrasi pertanahan yang selama ini menggunakan cara terestrial dan fotogrametri belum mampu memenuhi dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Saat ini Kabupaten Gresik sedang mengadakan program kadaster lengkap. Dibutuhkan peta dasar dalam memenuhi program tersebut, di mana peta dasar diperoleh secara cepat dan akurat menggunakan data berupa citra satelit resolusi tinggi.

**Analisis Kelayakan Implementasi *E-Government* dalam Pelayanan Publik di Bidang Keagrariaan di Kabupaten Pinrang**  
**(*Analisis of E-Government Implementation Feasibility of Public Service in Agrarian Field at Pinrang Regency*)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	320.8.JUL.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Komunikasi KAREBA
<b>Pengarang</b>	Juliasti Surdin
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kesiapan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terhadap peraturan yang mendukung dalam penerapan <i>e-government</i> (2) mengetahui kesiapan Sumber Daya Manusia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terhadap pengetahuan dan keterampilan aparat dalam penerapan <i>e-government</i> (3) mengetahui dukungan infrastruktur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang dalam hal <i>hardware</i> dan <i>software</i> untuk penerapan <i>e-government</i> . Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, pada bulan April sampai bulan Juli 2015.

## Analisis Manajemen Penanganan Keluhan di Kantor Pertanahan Kota Semarang

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	621.44.RHE.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Journal of Public Policy and Management Review
<b>Pengarang</b>	Tatag Puji Wibowo Subowo Susi Sulandari
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Kantor Pertanahan Kota Semarang melakukan pengelolaan dan penanganan keluhan masyarakat dari sudut pandang teori manajemen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan analisis data yang berproses secara induktif.

## Analisis Prosedur Penyimpanan dan Pengelolaan Arsip Surat Ukur Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	651.5.HER.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Pengarang</b>	Herru Nurrachman Marlini
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kajian dalam penelitian membahas tentang prosedur penyimpanan dan pengelolaan arsip di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang prosedur penyimpanan <i>file</i> dan pengelolaan arsip di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan mengunjungi langsung ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengamati dan melakukan wawancara.

## Analisis Sosio Yuridis terhadap Sengketa dan Perkara Pertanahan di Kota Makassar

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.3.NUR.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Al Hikam
<b>Pengarang</b>	Nur Hasanah
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sengketa tanah sering terjadi di Kota Makassar, terutama mengenai bukti kepemilikan sebidang tanah, sebagai bukti kepemilikan kadang-kadang tidak sesuai dengan bidang tanah yang ditunjuk dengan bukti administrasi dipegang oleh orang yang mengaku sebagai pemilik yang menyebabkan perselisihan.

**Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan *One Day Service* dalam Program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional (Studi di Kantor Pertanahan Kota Depok)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.5.HIL.e
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Diponegoro Law Journal
<b>Pengarang</b>	Hilda Agustina Wahyuni Ana Silviana Sukirno
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian dari efektivitas pelaksanaa pelayanan <i>One Day Service</i> di Kantor pertanahan Kota Depok ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan pelayanan <i>One Day Service</i> serta mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang muncul serta upaya apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Depok saat pelaksanaan pelayanan <i>One Day Service</i> .

## Fungsi Badan Pertanahan Nasional terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.3.FIN.f
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Lex Privatum
<b>Pengarang</b>	Fingli A. Wowor
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara yang ditempuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan sengketa tanah sebagai implementasi dari salah satu fungsi Badan Pertanahan Nasional dan bagaimana mekanisme yang ditempuh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan sengketa tanah adat di Indonesia.

## Hambatan dalam Proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.3.DAN.h
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
<b>Pengarang</b>	Danita Adriani
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Persyaratan pemindahan hak telah diatur di dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam praktik peralihan hak atas tanah, bahwa ternyata masyarakat tidak selalu melakukan pembayaran secara tunai tetapi biasanya juga dilakukan dengan cara mencicil. Untuk melindungi pihak pembeli yang telah membayarkan cicilan karena balik nama belum bisa dilakukan, maka para pihak sering kali menjembatani dengan membuat akta perjanjian pengikatan jual beli seperti halnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung.

## Implementasi Kebijakan Program Prioritas Legalisasi Aset Sertifikat Tanah bagi Nelayan di Kota Cirebon

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.3.MIS.i
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia
<b>Pengarang</b>	Misbak
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

## Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kota Manado

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.MER.i
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Administrasi Publik
<b>Pengarang</b>	Meryansi Sappe Ruruk Alden Laloma Jericho D. Pombengi
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sistem Informasi Manajemen dari Kebijakan Pertanahan Nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian yang cepat dari pemeliharaan tanah mengingat tanah adalah sesuatu yang bertahan lama dan bermanfaat bagi manusia. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional masih belum berjalan dengan baik, sehingga penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional.

## Implementasi Politik Hukum Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua dalam Hukum Tanah Nasional

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	348.598.RIT.i
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Repertorium
<b>Pengarang</b>	Ritta Yoalili
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Politik hukum pertanahan dan keadilan formal, untuk menyatukan dua kalimat ini sangat tidak mudah karena begitu banyak kepentingan ikut mewarnai dalam setiap kebijakan tentang pertanahan yang dikeluarkan. Regulasi pertanahan dari orde baru hingga ke era reformasi masih saja belum menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di bidang pertanahan, khususnya mengenai masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Membicarakan hukum adat secara ilmiah harus dikaji secara mendalam, mengenai sejarah adat istiadat, sejarah kepemilikan dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat hukum adat tersebut.

## Implementasi Program Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Sistem *Online* di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.8.PTP.e
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Diponegoro Law Journal
<b>Pengarang</b>	Astika Febrianda Saraswati Ana Silviana Sukirno
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pendaftaran tanah penting dilakukan karena bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat kuat. Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal memfasilitasi pendaftaran pemeliharaan data secara <i>online</i> (PPAT <i>online</i> ) yang berbasis teknologi informasi. Program ini bermanfaat bagi PPAT di Kabupaten Kendal untuk mempercepat pelayanan pemeliharaan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program tersebut serta kendala yang timbul dalam pelaksanaan.

## Kajian Yuridis Standar Pelayanan Publik pada Badan Pertanahan Nasional di Era Otonomi Daerah

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	352.14.MOH.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Lex Privatum
<b>Pengarang</b>	Mohamad Eka Putra Manoppo
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian standar pelayanan publik di era otonomi daerah dan bagaimana faktor-faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

## Kajian Yuridis tentang Eksistensi Hak Milik Atas Tanah yang Belum Memiliki Sertifikat Kepemilikan Tanah

**Kode Klasifikasi DDC**

333.3.ALB.k

**Sektor**

Tata Ruang dan Penanganan Bencana

**Sub-Sektor**

Pertanahan

**Penerbit**

Lex Crimen

**Pengarang**

Albert

**Tahun Terbit**

2016

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi yuridis hak milik atas tanah yang belum memiliki bukti sertifikat dan bagaimana prosedur hukum untuk mendapatkan bukti sertifikat hak milik atas tanah.

## Keberadaan Tanah Adat dan Tanah Negara bagi Kepentingan Masyarakat

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.3.MAH.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Morality
<b>Pengarang</b>	Maharidiawan Putra
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Hukum pertanahan di Indonesia terkesan masih dualisme. Membingungkan dua belah pihak, baik pemerintah maupun rakyat. Untuk menjamin kepastian hukum, dianjurkan orang memiliki sertifikat atas tanah, ada bukti tertulis. Masalahnya banyak pemilik tanah di Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang silam tidak memiliki sertifikat mengenai penguasaan hak atas tanah itu. Khususnya para petani dan masyarakat tradisional.

## Keberpihakan Regulasi Pertanahan terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	348.598.RAT.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
<b>Pengarang</b>	Ratna Artha Windari
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah adat di Desa Kubutambahan dan bentuk keberpihakan regulasi pertanahan terhadap hak masyarakat adat; serta peran Desa Pakraman dalam mengatasi sengketa tanah adat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

## Kebijakan Pemerintah tentang Pengaturan mengenai Pertanahan dalam Penanaman Modal dan Investasi di Indonesia

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	332.6.EFR.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	INOVATIF   Jurnal Ilmu Hukum
<b>Pengarang</b>	Efrimol
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kebijakan pemerintah dalam pengaturan mengenai pertanahan dalam penanaman modal dan investasi di Indonesia semakin penting untuk meningkatkan minat investor di Indonesia dan pengembangan pasar modal itu sendiri. Mengingat tanah memiliki arti yang sangat penting dalam investasi, maka kebijakan pemerintah harus diorientasikan bagi kemudahan investasi.

## Kebijakan Pertanahan pada Era Otonomi Daerah di Bidang Hak Guna Usaha Perkebunan

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	352.14.SUH.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
<b>Pengarang</b>	Suhariningsih
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kebijakan pertanahan di bidang Hak Guna Usaha (HGU Perkebunan) perlu ditata kembali, mengingat politik hukum pembangunan ekonomi di era reformasi mengarah pada pasar bebas.

## Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang Kota Pontianak)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.3.SYA.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Akta
<b>Pengarang</b>	Syarifah Lia Malini Sari Lathifah Hanim
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Apabila ada tanah yang tidak digunakan secara efektif ( <i>oneffectief gebruik</i> ) atau ditelantarkan oleh pemiliknya, maka tanah itu akan dikuasai oleh negara. Tujuan pokok dari UUPA tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai kepemilikan hak atas tanah bagi rakyat, tetapi UUPA juga mengatur mengenai macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dimiliki oleh perseorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ataupun badan hukum.

## Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan di Era Otonomi Daerah

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	352.14.MUS.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Journal de Jure
<b>Pengarang</b>	Musleh Herry
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sejak era reformasi bergulir, pemerintah melakukan revolusi di bidang administrasi pemerintahan guna memajukan negara Indonesia. Salah satu revolusi yang terjadi adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain di bidang pertanahan. Semula kewenangan bidang pertanahan ini urusannya berada di pemerintah pusat.

## Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.3.H. .k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Menara Riau
<b>Pengarang</b>	H. Mohd. Yunus
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Adapun bentuk konflik yang terjadi di Provinsi Riau khususnya yang berkaitan dengan konflik lahan pertanahan terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan masyarakat, dan antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat (tanah ulayat). Berbagai konflik ini terjadi karena dipicu oleh isu lingkungan, isu penyerobotan lahan masyarakat, isu tumpang tindih lahan dan termasuk konflik tapal batas antar kabupaten kota dalam Provinsi Riau dan tapal batas wilayah provinsi dengan provinsi tetangga, serta isu lingkungan yang semua itu akibat adanya prosedural yang dilanggar dan tidak mengikuti aturan dalam merealisasikannya di lapangan.

## Masalah Pertanahan di Indonesia dan Implikasinya terhadap Tindak Lanjut Pembaruan Agraria

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.31.SUM.m
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	FAE
<b>Pengarang</b>	Sumaryanto Syahyuti Saptana dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2002
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Salah satu masalah mendasar yang dihadapi Indonesia dalam membangun sistem pertanian yang tangguh adalah struktur penguasaan tanah yang tidak terkonsolidasi, serta penguasaan rata-rata per petani yang sangat kecil dan timpang. Sampai saat ini upaya memperbaiki struktur penguasaan tanah tidak tercapai. Hal itu merupakan akibat dari rumusan kebijakan yang tidak mampu mengakomodasikan faktor-faktor strategis dalam masalah pertanahan dan implementasi kebijaksanaan yang kurang konsisten.

## Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli dalam Hal Salah Satu Penjual Masih di Bawah Umur dan Pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kota Tegal

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.3.ANJ.m
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Akta
<b>Pengarang</b>	Anjar Restu Ashari Amin Purnawan
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme peralihan hak atas tanah, apa saja kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana pemecahannya dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang terkait dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah hukum dan norma-norma hukum serta peraturan-peraturan yang ada, yang kemudian dianalisis dan dikaji bagaimana hal tersebut bekerja di masyarakat.</p>

## Pelaksanaan Roya Partial Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Semarang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	348.598.MEG.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Diponegoro Law Journal
<b>Pengarang</b>	Mega Ria Sagita Kashadi Siti Malikhatun Badriyah
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Roya Partial Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sifat Hak Tanggungan yang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga Roya Partial dapat dilaksanakan dengan syarat janji adanya Roya Partial diperjanjikan terlebih dahulu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Namun, berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan undang-undang tersebut.

## Pemberdayaan Hukum dan Kebijakan Pertanahan sebagai Upaya Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	070.4.CSU.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Mimbar Hukum
<b>Pengarang</b>	Arba Sahnan Wiwiek Wahyuningsih
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk menemukan upaya pemberdayaan hukum dalam menertibkan dan mendayagunakan tanah telantar di Nusa Tenggara Barat.

## Pemberian Kuasa Pendaftaran Tanah Melalui *One Day Service*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.3.HOO.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
<b>Pengarang</b>	Hoo Go Huk Suhariningsih Sihabudin
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kantor Pertanahan Kota Malang merespon keluhan masyarakat mengenai lambatnya pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Malang serta mahalanya biaya yang dikenakan melalui inovasi layanan pertanahan, yaitu <i>One Day Service</i> yang merupakan program nasional. Ini merupakan layanan satu hari selesai di bidang pertanahan yang dilaksanakan pada Loker Pelayanan Kantor Pertanahan maupun mobil LARASITA.

## Penataan Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan di Masa Mendatang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.3.MUS.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Journal de Jure
<b>Pengarang</b>	Musleh Herry
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Membuat suatu kebijakan ( <i>regelgeving</i> ) merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Kenyataan bahwa semua warga negara senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Perkembangan konsep hak menguasai tanah oleh negara bermula dari konstitusi yang kemudian dituangkan dalam UUPA.

## Pendaftaran Tanah Adat

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.3.IND.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Al' Adl: Jurnal Hukum
<b>Pengarang</b>	Indah Mahniasari
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pertanahan di Indonesia sangat menarik untuk selalu dikaji. Sehingga tidak heran ketika dikatakan bahwa masalah tanah adalah masalah klasik yang sangat menarik. Dari dulu hingga saat ini ada saja masalah yang timbul dan tenggelam mengenai pertanahan.

## Pengaruh Implementasi Kebijakan Pertanahan terhadap Struktur Penguasaan Tanah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Garut dan Subang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.3.SIN.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Kependudukan Padjadjaran
<b>Pengarang</b>	Sintaningrum
<b>Tahun Terbit</b>	2008
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini didasarkan pada permasalahan terkait dengan adanya ketimpangan struktur penguasaan tanah dan rendahnya kesejahteraan petani di Kabupaten Subang dan Garut. Faktor penyebab masalah tersebut pada awalnya diduga disebabkan oleh implementasi kebijakan pertanahan yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya di kedua daerah tersebut. Penelitian menggunakan desain <i>explanatory survey</i> dan analisis jalur.

## Pengaruh Pelayanan Bidang Penerbitan Sertifikat Tanah terhadap Kepuasan Masyarakat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.3.YUS.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Administrasi Publik
<b>Pengarang</b>	Yusran Paris
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Esensi visi pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima, yang berarti mampu mewujudkan kepuasan masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan dari instansi pemerintah. Berdasarkan visi tersebut, maka misi pelayanan publik pada dasarnya adalah mengimplementasikan asas, prinsip, nilai-nilai pelayanan baik berdasarkan landasan normatif maupun landasan kepatutan sesuai hakikat pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh responsibilitas pelayanan penerbitan sertifikat tanah terhadap kepuasan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar.</p>

**Penjabaran Asas-Asas Pembaharuan Agraria Berdasarkan TAP MPR No IX/MPR/2001 dalam Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	348.598.NUR.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
<b>Pengarang</b>	Nurhasan Ismail Suyitno Rafael Edy Bosko dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini membahas apakah asas-asas pembaruan agraria telah sejalan dengan hukum pertanahan Indonesia dan UUPA serta bagaimana asas-asas tersebut diterapkan dalam peraturan-peraturan pemerintah di bidang pertanahan.

**Penunjukan Desa Pakraman sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.3.ANA.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Acta Comitas
<b>Pengarang</b>	Anak Agung Ayu Intan Puspawati I Made Arya Utama I Ketut Wirawan
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pada tanggal 23 Oktober 2017 ditetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah. Keputusan Menteri tersebut telah memberikan penegasan terhadap pengakuan Desa Pakraman sebagai masyarakat hukum adat di Provinsi Bali.

## Penyelesaian Sengketa Tanah antara Petani dengan PT. Mackenzie Melalui Mediasi (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT. Mackenzie di Kabupaten Pematang)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.2.NUR.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Diponegoro Law Journal
<b>Pengarang</b>	Nurhasan Ismail Suyitno Rafael Edy Bosko dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tanah memiliki arti penting bagi manusia, berbagai kepentingan terhadap tanah sering menimbulkan persengketaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan lama kelamaan menjadi tidak efektif. Penyelesaian sengketa tanah dapat pula ditempuh dengan upaya di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi.

**Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi**  
*(The National Land Agency's Role in Adjudicating the Double Ownership Land Certificate in Batanghari Districk Jambi Province)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.3.MAR.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Al-Risalah
<b>Pengarang</b>	Marlia Ardiani
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tulisan ini bertujuan untuk membahas latar belakang terbitnya sertifikat tanah berganda di Kabupaten Batanghari serta penyelesaiannya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris yang dipadukan dengan metode penelitian kualitatif.

## Perolehan Tanah bagi Pembangunan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah di Kota Semarang (Berdasarkan Perspektif Hukum Pertanahan Nasional)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	725.8.ARI.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Diponegoro Law Journal
<b>Pengarang</b>	Ariefa Naila Izzati Ana Silviana Triyono
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tanah merupakan suatu benda bersifat permanen yang disadari atau tidak menimbulkan permasalahan. Salah satunya terjadi di Jawa Tengah dalam pelaksanaan perolehan tanah bagi pembangunan PRPP antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. IPU yang kejelasan atas penguasaan dan pemanfaatan tanah di PRPP belum sejalan dengan kronologis pelaksanaan perolehan tanah serta adanya penyimpangan dalam pemberian kuasa. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mekanisme perolehan tanah bagi pembangunan PRPP.

## Politik Hukum Pertanahan sebelum dan sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	348.598.MEX.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau
<b>Pengarang</b>	Mexasai Indra
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Membicarakan korelasi hukum dan politik selalu menjadi isu yang selalu menarik untuk diperbincangkan termasuk pembangunan hukum di bidang pertanahan karena terjadi perbedaan yang sangat prinsipil antara kebijakan pertanahan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria terutama yang berkaitan dengan konsepsi hak menguasai negara.

## Prinsip Tanah Walaka pada Masyarakat Hukum Adat Tolaki dalam Sistem Pertanahan

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	340.5.OLI.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Hukum Volkgeist-Mimbar Pendidikan Hukum Nasional
<b>Pengarang</b>	Olivia Muldjabar
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang logis dan proporsional, di mana pandangan mengenai hal tersebut yakni di suatu pihak terdapat kekhawatiran bahwa tanah ulayat yang semula sudah tidak ada kemudian dinyatakan hidup lagi, dan di pihak lain ada kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya kebutuhan atas tanah akan semakin mendesak hak ulayat yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 3 UUPA. Demikian pula dengan masyarakat Suku Tolaki yang mempunyai hukum adat mengenai pertanahan.

## Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) di Kabupaten Pemalang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.3.CIC.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Diponegoro Law Journal
<b>Pengarang</b>	Cici Rizki Andriani Ana Silviana Marjo
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	LARASITA dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pengembangan LARASITA berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Kantor Pertanahan dengan masyarakat, sekaligus mengubah pandangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif.

## Resolusi Sengketa Kolektif di Bidang Pertanahan dalam Perspektif Hukum dan Sosial

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.3.MUH.r
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Hukum Ius Quia Iustum
<b>Pengarang</b>	Muhammad Arif Setiawan
<b>Tahun Terbit</b>	2006
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Terdapat berbagai pilihan alternatif cara penyelesaian sengketa komunal dalam sengketa tanah. Padahal, penerapan pendekatan hukum positif bukan satu-satunya instrumen untuk menyelesaikan sengketa.

## Sertifikat Cacat Hukum dalam Hukum Pertanahan di Indonesia

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.3.KHA.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)
<b>Pengarang</b>	Khairina
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan izin tanah memiliki hubungan yang besar dengan hukum tanah. Mengisi formulir kepemilikan tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) di mana tanah tersebut berada akan memberikan sertifikat tanah kepada pemiliknya. Sertifikat ini akan menjadi fakta oleh pemiliknya ketika mereka menghadapi masalah hukum apapun. Sertifikat ini bisa menjadi fakta oleh pemiliknya jika tidak ada keluhan dari orang lain yang mungkin mengklaim tanah itu sebagai tanah mereka.

## Sertifikasi Tanah Magersari oleh Pekerja Hutan di Kawasan Hutan Bayat Kabupaten Klaten

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.3.RIZ.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Diponegoro Law Journal
<b>Pengarang</b>	Rizki Rahardianto Putra Ana Silviana Triyono
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kawasan hutan yang berada di Komplek Hutan Bayat, bagian Hutan Surakarta, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Surakarta terdapat kawasan hutan yang diterbitkan sertifikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yaitu sebanyak 17 sertifikat hak milik atas nama perorangan masyarakat Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses sertifikasi tanah negara menjadi tanah hak di Kawasan Magersari Hutan Bayat Kabupaten Klaten.

## Tinjauan Hukum terhadap Sistem Pendaftaran Tanah secara Sporadik di Kabupaten Morowali

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.3.ROS.t
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion
<b>Pengarang</b>	Rosa Sulistiati
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Tulisan ini berjudul Tinjauan Hukum terhadap Sistem Pendaftaran Tanah secara Sporadik di Kabupaten Morowali, dengan identifikasi masalah proses/pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Morowali dan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Morowali. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sistem pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Morowali yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali dan hambatan-hambatan yang timbul dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang timbul dalam sistem pendaftaran tanah secara sporadik.</p>

## Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah yang Dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang (Badan Pertanahan Nasional)

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.3. EL.t
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Lex Crimen
<b>Pengarang</b>	Elisa Debora Waani
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan pejabat pembuat akta tanah yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat tanah dan bagaimana kekuatan hukum sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

## Urgensi Penetapan Limitasi Waktu Pemeriksaan Kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan sebelum Pembuatan Akta oleh PPAT

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	333.3.NUR.u
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
<b>Pengarang</b>	Nurudin
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi penetapan limitasi waktu pemeriksaan kesesuaian sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan oleh PPAT, serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta tanpa melakukan pemeriksaan kesesuaian sertifikat di Kantor Pertanahan. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah secara yuridis normatif.

# **RINGKASAN KAJIAN**

## Pengembangan Aplikasi Layanan Pertanahan Berbasis *Web* pada Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Badung

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	005.5.HER.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Pertanahan
<b>Penerbit</b>	Seminar Nasional Informatika 2008 (semnasIF 2008)
<b>Pengarang</b>	Herry Sofyan Yuli Fauziah I Gede Yoby Negara
<b>Tahun Terbit</b>	2008
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Proses pendaftaran permohonan bukti hak atas tanah (sertifikat) sering kali menjadi hal yang sangat menjemukan bagi sebagian masyarakat. Hal ini dikarenakan proses pengurusan yang dianggap terlalu lama dan kurang informatif. Hal tersebut dikarenakan masih banyak kantor-kantor BPN yang ada di kabupaten dan kota yang melakukan proses pembuatan sertifikat secara manual, seperti misalnya pada Kantor BPN Kabupaten Badung.

# **SISTEM INFORMASI DAN DATA REGIONAL**

**JURNAL**

## **Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja**

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	005.36.FER.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal SISFOKOM (Sistem Informasi dan Komputer)
<b>Pengarang</b>	Ferry Prasetyo
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pangkalpinang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas bidang pemerintahan Penegakan Peraturan (Peraturan) yang dipimpin oleh seorang jawan Kepala Badan Kantor Walikota Pangkalpinang yang diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pangkalpinang beralamat di Jl. Desa Batu Berlian Girimaya Pangkalpinang. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pangkalpinang memiliki beberapa bidang teknis dan sub-bagian.

## **Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.DAN.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmiah DASI (Data Manajemen dan Teknologi Informasi)
<b>Pengarang</b>	Danisa Zairen Anggit Dwi Hartanto
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas utama dalam bidang kepegawaian di tingkat lokal. Termasuk di dalamnya tugas pokok mengurus urusan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai negeri sipil. Saat ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tidak memiliki Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), sehingga pengolahan dan pelaporan data secara keseluruhan masih menggunakan sistem semi komputerisasi yang mengakibatkan banyak kendala dalam pengolahannya.

## **Analisis Geospasial Persebaran TPS dan TPA di Kabupaten Batang Menggunakan Sistem Informasi Geografis**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.MUF.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Geodesi Undip
<b>Pengarang</b>	Mufti Yudiya Marantika Sawitri Subiyanto Hani'ah
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Informasi mengenai sarana kebersihan berupa TPS dan TPA sangat diperlukan guna menunjang sistem pengelolaan kebersihan di Kabupaten Batang.

## Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	621.44.RHE.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Indonesian Journal of Strategic Management
<b>Pengarang</b>	Edi Yanto Akfir
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui penerapan SIMDA Keuangan sebagai sistem informasi akuntansi daerah dapat mempermudah tugas pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal yang diterapkan guna mencapai tujuan pelaporan, dan cakupan analisis kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli.

## Analisis Sebaran Reklame *Billboard* terhadap Lokasi dan Nilai Pajak Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.DYA.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Geodesi Undip
<b>Pengarang</b>	Dyah Widyaningrum Bambang Sudarsono Arief Laila Nugraha
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Periklanan memegang peranan cukup penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Keberhasilan dari suatu perekonomian secara nasional banyak ditentukan oleh kegiatan-kegiatan periklanan. Reklame merupakan salah satu sarana dalam mempresentasikan suatu pesan berupa barang atau jasa. Reklame dikelola oleh pemerintah daerah dan terdapat pajak dari pemasangan iklan tersebut, yang sering disebut dengan pajak reklame.

## **Analisis Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lahat**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.RES.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi
<b>Pengarang</b>	Restu Inayah Arista Hakiki Relasari
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini membahas tentang analisis Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk keuangan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lahat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sistem penguraian dari suatu sistem informasi, yaitu SIMDA Keuangan berbasis akrual menjadi bagian dari komponen (dengan tujuan) untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah, peluang, hambatan, dan kebutuhan rekomendasi dapat disarankan.

**Aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Sebaran Potensi Alam dan Pemanfaatan Lahan Hutan Lindung Sibayak II Taman Hutan Raya Bukit Barisan**  
***(Geographis Information System Application for Mapping the Natural Resources Potential Distribution and Land Using of Sibayak II Forest Area Taman Hutan Raya Bukit Barisan)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.5.GEB.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Peronema Forestry Science Journal
<b>Pengarang</b>	Geby Rheviaa Oding Affandia Rahmawaty
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Aplikasi Sistem Informasi Geografis telah digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian yang memiliki basis regional geografi. Salah satu aplikasinya adalah untuk pemetaan potensi sebaran lanskap. Kawasan Hutan Sibayak II merupakan salah satu kawasan konservasi Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang letaknya strategis dan dikelilingi oleh banyak potensi wisata, potensi sumber daya alam dan fungsi hidrologis.

**Evaluasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kabupaten Pemalang**  
*(Evaluation of the Keputusan Menteri Dalam Negeri Number 17 at 2000 about Human Resources Management Information System within the City of Pemalang)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.DIN.e
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Journal of Public Policy and Management Review
<b>Pengarang</b>	Dino Angga Lesmana Aufarul Marom
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang diterapkan di Subbidang dokumentasi dan pengolahan data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang dan mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan tiga aspek utama, yaitu sistem dan empat faktor yang mempengaruhi dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

## Ipteks Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.5.PAT.i
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat
<b>Pengarang</b>	Patricia Watulingas Steven Tangkuman
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sistem di instansi pemerintah sangat penting, dalam hal ini manajemen keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk aplikasi keuangan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Sistem ini merupakan sistem sederhana untuk mengolah, memperoleh, menyusun, dan menyimpan data untuk menghasilkan informasi strategis. Manfaat yang diperoleh dengan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem aplikasi keuangan daerah SIMDA adalah data yang sudah diinput tidak perlu di input berulang-ulang, dan jika data terinput kembali maka data akan muncul secara otomatis.

### **Ipteks Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kota Manado**

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	658.4038.KEZ.i
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat
<b>Pengarang</b>	Kezia Wantah Diana Lintong
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kota Manado merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu walikota dalam menetapkan kebijakan di wilayah perencanaan pembangunan di daerah serta mengevaluasi dan melaksanakannya. Untuk memudahkan pengelolaan keuangan di organisasi pemerintah daerah, BAPELITBANGDA menerapkan SIMDA dalam sistem pengelolaan keuangannya. SIMDA Finance adalah program aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## Kajian Pemetaan Kerentanan Kota Semarang terhadap Multibencana Berbasis Pengindraan Jauh dan Sistem Informasi Geografis

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.DED.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Geodesi Undip
<b>Pengarang</b>	Dede Handoko Arief Laila Nugraha Yudo Prasetyo
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kota Semarang merupakan salah satu daerah di Indonesia yang termasuk ke dalam daerah yang rawan terjadi bencana. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu kajian mitigasi terhadap multibencana di Kota Semarang. Aspek terpenting dalam mitigasi bencana adalah penilaian terhadap kerentanan wilayah berpotensi rawan bencana dan metode yang dapat digunakan dalam pengkajiannya adalah kombinasi dari metode pengindraan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG).

## Klastering Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Menggunakan Sistem Informasi Geografis

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.ARI.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Sains dan Teknologi
<b>Pengarang</b>	Arif Setiawan Pratomo Setiaji
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian dengan judul Klastering Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Menggunakan Sistem Informasi Geografis dilakukan dalam rangka memberikan acuan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, dalam mengembangkan industri kecil dan menengah di Kecamatan Gebog. Klastering industri kecil dan menengah di Kecamatan Gebog dipetakan berdasarkan lokasi. Pemetaan industri di Kecamatan Gebog merupakan langkah awal pengembangan industri kecil dan menengah di seluruh wilayah Kudus.

## Konsep *Sharing* Data dalam Sistem Informasi Geografis

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	333.8.PTP.e
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal PWK
<b>Pengarang</b>	Roos Akbar
<b>Tahun Terbit</b>	1993
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Bagian terpenting dan tersulit dalam membangun suatu sistem informasi geografis adalah menyiapkan basis data. Dana awal yang dibutuhkan biasanya mencapai 5-10 kali biaya yang harus dikeluarkan saat membeli perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi geografis (Stan Aronof, 1989; lihat juga Roos Akbar, 1993). Data yang dibutuhkan untuk membangun basis data dalam suatu sistem informasi geografis biasanya tidak bersumber hanya pada suatu institusi pembuat data. Data yang dibutuhkan biasanya tersebar pada berbagai institusi, baik berupa data yang masih mentah maupun data yang sudah diolah dalam bentuk informasi.

**Penerapan SIG dalam Menentukan Kondisi Kritis dan Model Rehabilitasi Ekosistem Bakau pada Daerah Pesisir Selatan Pamekasan, Madura**  
***(GIS Application to Determine Critical Condition and Rehabilitation Model of Mangrove Ecosystem in Southern Coast of Pamekasan Region Madura)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.ZAI.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan
<b>Pengarang</b>	Zainul Hidayah
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Hutan bakau adalah salah satu ekosistem pesisir yang memiliki nilai ekologi dan ekonomi tinggi. Ekosistem ini dikenal karena perannya dalam melindungi pesisir terhadap gelombang dan serangan badai, juga sebagai pendukung kehidupan bermacam-macam organisme laut. Namun, peningkatan jumlah populasi manusia serta kebutuhannya untuk memperluas areal pemukiman dan industri menyebabkan ekosistem bakau terancam. Di mana saat ini luas areal hutan bakau di dunia terus-menerus mengalami pengurangan.

## Pengembangan Proses Bisnis dan Rancangan Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan dan Penilaian Peserta *Co-Ass* pada RSUD

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	005.5.YAN.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications
<b>Pengarang</b>	Yanti Yunita Fransisca Jacklyn Suwargo
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerimaan dan penilaian peserta <i>Co-Ass</i> pada RSUD yang masih dilakukan secara manual, mengidentifikasi masalah yang terjadi serta informasi apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi penerimaan dan penilaian peserta <i>Co-Ass</i> pada RSUD, dan merancang pengembangan sistem informasi penerimaan dan penilaian peserta <i>Co-Ass</i> pada RSUD.

## Pengembangan Sistem Informasi Kerja Sama Berbasis *Web* Studi Kasus: Pada SEAMOLEC

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.CAS.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)
<b>Pengarang</b>	Castaka Agus Sugianto Iqna Aulia
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p><i>South East Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre</i> (SEAMOLEC) merupakan salah satu instansi yang memiliki 500 mitra kerja sama baik dalam dan luar negeri. Saat ini data kerja sama pada SEAMOLEC belum terintegrasi dengan baik. Data antara pihak penyelenggara kerja sama atau dalam hal ini disebut mitra SEAMOLEC dicatat dalam bentuk <i>file</i> berupa excel/word yang terpisah. Proses penyusunan dan pencarian data instansi yang melangsungkan kerja sama dalam periode waktu tertentu membutuhkan proses dan waktu yang lama.</p>

## **Pengembangan Sistem Informasi Pengolahan Pajak pada Bidang Pajak Daerah Hotel dan *Restaurant* di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.YEL.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar
<b>Pengarang</b>	Yelli Eka Sumadhinata Irma Wibiyanti
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Dari awal daerah otonomi sekarang, setiap daerah harus mengembangkan kemampuan mendapatkan sumber pendapatan daerah untuk belanja APBD dan dengan menggunakan pajak daerah yang maksimal. Untuk itu diperlukan suatu pengembangan sistem baru untuk meng- <i>encode</i> pemrosesan di wilayah pajak komputer dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu tentang dasar keunggulan pajak penghasilan daerah dan bagaimana mengolah data dari laporan wajib pajak.

## Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Perkiraan Kejadian Luar Biasa Penyakit Demam Berdarah *Dengue* di Kota Yogyakarta

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.DYA.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Penelitian Humaniora
<b>Pengarang</b>	Dyah Respati Suryo Sumunar
<b>Tahun Terbit</b>	2009
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kejadian kasus penyakit DBD pada satu wilayah permukiman tertentu, (2) Mengetahui bagaimana manfaat Sistem Informasi Geografis untuk pengelolaan data spasial khususnya terkait penyakit DBD melalui pendugaan data spasial, dan (3) Mengetahui peran teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan estimasi atau estimasi untuk terjadinya kejadian luar biasa (KLB) DBD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penggabungan antara interpretasi foto udara dan di lapangan.

## Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Korban Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Ternate

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.ABD.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmiah ILKOMINFO-Ilmu Komputer dan Informatika
<b>Pengarang</b>	Abdul Syah Lamahamu Subhan
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate merupakan sebuah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk membantu mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu. Saat ini BPBD dalam melaksanakan proses pendataan korban bencana masih lambat disebabkan karena masih memprosesnya secara manual. Dalam melakukan proses pendataan di setiap posko pengungsi kemungkinan masih terjadinya kesulitan antara lain, perhitungan yang kurang akurat dan waktu yang cukup lama dalam pengolahan data.

## Rancang Bangun Sistem Informasi Analisis Kebutuhan Diklat bagi Guru SMK di Dispendik Provinsi Jawa Timur

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	005.36.KRI.r
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	JSIKA
<b>Pengarang</b>	Kristono Sugiarto Dewiyani Sunarto Yopy Mirza Maulana
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kejuruan (PPPK) adalah unit teknis dan operasional Dinas Pendidikan (Dispendik) Daerah Jawa Timur yang menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan pendidikan vokasi. UPT PPPK mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan pendidikan vokasi, administrasi, dan pelayanan publik. UPT PPPK memiliki Bagian Pelayanan Pendidikan (Seksi Pelayanan Pendidikan) yang bertugas menyelenggarakan pelatihan bagi guru SMK di setiap wilayah Jawa.

## Sistem Informasi Antropometri Terintegrasi dengan Sistem Tertanam sebagai Pengukur Berat dan Tinggi Balita

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.NUG.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer
<b>Pengarang</b>	Nugroho Budi Wicaksono Rinta Kridalukmana Ike Pertiwi Windasari
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tumbuh kembang anak Indonesia terpantau setiap bulan dan dapat dilihat melalui grafik KMS dan buku kader posyandu. Data dari kegiatan posyandu akan dievaluasi oleh Dinas Kesehatan. Dalam prakteknya, ada banyak kendala untuk membuat posyandu berjalan ideal. Pertama, kader posyandu sulit menggunakan peralatan antropometri yang konvensional, sehingga data pengukuran mungkin tidak valid dan tepat. Kedua, pencatatan pada grafik KMS membutuhkan akurasi.

**Sistem Informasi Geografis Berbasis *Web* untuk Pemetaan Jalan dan Bangunan (Studi Kasus: Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya)**

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	005.36.AGU.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Khatulistiwa Informatika
<b>Pengarang</b>	Agung Sasongko
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Pengawasan dan pengendalian pembangunan gedung di wilayah merupakan salah satu tugas Bidang Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum. Dalam upaya pengambilan keputusan diperlukan alat bantu berupa peta visualisasi yang dapat dengan cepat menentukan posisi bangunan dan jalan, sehingga memberikan gambaran umum yang cepat untuk Bidang Tata Ruang agar dapat memberikan keputusan dapat atau tidaknya suatu bangunan didirikan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Teknologi informasi saat ini telah memungkinkan untuk memberikan informasi visual berupa peta sehingga lebih mudah dipahami.</p>

## Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lahan Pertanian dan Komoditi Hasil Panen Kabupaten Kudus

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.ARI.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Informatika
<b>Pengarang</b>	Arief Susanto Ahmad Kharis Tutik Khotimah
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan informasi saat ini, GIS ( <i>Geographic Information System</i> ) sedang dikembangkan baik desktop maupun <i>online</i> . Banyak lembaga pemerintah dan perusahaan yang memanfaatkan teknologi GIS untuk mengumpulkan data di wilayah dan catatan asetnya, seperti data tanah, data wilayah dan lain-lain. Salah satu yang memerlukannya yakni Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus.

**Sistem Informasi Inventaris Alat Tulis Kantor dan Suvenir pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar Berbasis *Dekstop***

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	005.36.YUD.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Tambora
<b>Pengarang</b>	Yudi Mulyanto Agus Satriansyah Sari Noviana
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk (1) merancang dan membangun Sistem Informasi ATK dan Suvenir pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa, (2) meminimalisasi duplikasi data dan mempercepat pengambilan data, (3) untuk memudahkan proses input dan pelaporan data.

## **Sistem Informasi Pelayanan Donatur pada Komunitas 1000 Guru Kalimantan Barat Berbasis Website**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.REZ.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Informatika, Manajemen dan Komputer
<b>Pengarang</b>	Reza Maulana Yoki Firmansyah Hairil
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Komunitas 1000 Guru Kalimantan Barat merupakan salah satu cabang regional 1000 guru pusat yang telah terbentuk sejak 22 Agustus 2012. Komunitas ini terbentuk atas kepedulian masyarakat terhadap isu ketidakmerataannya pendidikan yang ada di pedalaman dan perbatasan Kalimantan Barat. Komunitas ini murni dibangun oleh relawan tanpa ada campur tangan pemerintah ataupun lembaga profit di dalamnya, namun dalam perjalanannya terdapat beberapa kendala yang terjadi terutama pada masalah keuangan.

## Sistem Informasi Pengolahan Data Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	070.4.CSU.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmiah ILKOMINFO-Ilmu Komputer dan Informatika
<b>Pengarang</b>	Sartika Muhammad Hadi Abjan Samad
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pengolahan Data Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara saat ini belum terkomputerisasi dan terkesan lambat, dalam pencarian Data Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) memerlukan waktu yang lama sehingga dianggap kurang efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat Sistem Informasi Pengolahan Data Bantuan Beasiswa Siswa Miskin untuk menghasilkan data yang lebih cepat dan akurat. Teknik pengumpulan data adalah observasi, <i>interview</i> dan kepustakaan.

## Sistem Informasi Periklanan dan Pelelangan Barang Hasil Pertanian (Studi Kasus Dinas Pertanian)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.TIU.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	JuTISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)
<b>Pengarang</b>	Tiur Gantini Riska Nurnajah
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Teknologi baru-baru ini dikembangkan dan diterapkan di kegiatan kita sehari-hari. Di antaranya adalah aplikasi teknologi pada kegiatan periklanan. Tujuan dari ini aplikasi ini untuk membantu petani memasarkan hasil panen langsung ke pelanggan sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan tidak ada penipuan dari pihak <i>broker</i> atau pihak <i>croper</i> . Aplikasi ini memungkinkan admin untuk mempromosikan Dinas Pertanian (Departemen Pertanian), mengelola pengguna, mengelola kategori, mengelola iklan, dan melaporkan estimasi.

## Sistem Informasi Sumber Daya Lahan Pertanian Indonesia: Status Terkini dan Arah Pengembangan ke Depan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.YIY.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Sumberdaya Lahan
<b>Pengarang</b>	Yiyi Sulaeman Ropik S. Saefoel Bachri dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Data dan informasi sumber daya lahan telah banyak disediakan, yang menjadi tantangan adalah mencari cara bagaimana: (i) data dan informasi itu tersedia lestari, diperbaharui secara periodik, serta dapat diakses dengan cepat dan mudah, (ii) masyarakat luas mengetahui keberadaannya dan memahami isinya sesuai dengan keperluannya, (iii) meningkatkan nilai tambah data sebagai sumber data dan informasi lainnya, dan (iv) menjadi acuan dalam kebijakan keruangan bidang sumber daya lahan dan pengembangan wilayah.

**Studi Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi dalam Menunjang Manajemen Strategi (Pada PT Telkom Persero, Tbk Divisi Regional III Jawa Barat dan Banten)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.SRI.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Telaah & Riset Akuntansi
<b>Pengarang</b>	Sri Fadilah
<b>Tahun Terbit</b>	2008
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pada dasarnya, sistem informasi akuntansi merupakan integrasi dari berbagai sistem pemrosesan transaksi yang ada dalam suatu perusahaan dalam membentuk jaringan dalam perjalanan pengolahan data yang terdiri dari berbagai macam prosedur untuk menghasilkan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan pelaksanaan informasi akuntansi sistem dalam mendukung strategi manajemen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dan studi kasus. Penelitian ini dilakukan di PT. TELKOM (Persero), Tbk Divre III Jawa Barat dan Banten.

## Teknik Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Identifikasi Potensi Kekeringan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.PUG.t
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Makara Teknologi
<b>Pengarang</b>	Puguh Dwi Raharjo
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tahun 2008 Kabupaten Kebumen dilanda kekeringan. Masyarakat kesulitan air bersih dan air irigasi menyusul menurunnya debit sumber air. Penggunaan data penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi daerah rawan kekeringan. Transformasi citra satelit Landsat TM untuk mendapatkan indeks kecerahan, indeks kebasahan, dan indeks vegetasi digunakan untuk mengetahui kondisi permukaan dalam hubungannya dengan kekeringan. Indeks kecerahan dan indeks kebasahan diperoleh dari modifikasi <i>tasseled cap</i> , sedangkan indeks vegetasi diperoleh dari nilai <i>normalized difference vegetation index</i> (NDVI).

# **RINGKASAN KAJIAN**

**Analisis Penerapan PSAK No.10 (Revisi 2010) tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing dalam Implementasi Sistem Informasi Akuntansi PT XYZ**  
***(The Analysis Application of PSAK No.10 (Revision 2010) about Change in Foreign Exchange Currency of Accounting Information System Implementation in PT XYZ)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.QUI.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Doctoral dissertation, Bakrie University
<b>Pengarang</b>	Quinzela Herany
<b>Tahun Terbit</b>	-
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Kegiatan ekonomi yang terus mengalami perkembangan setiap tahunnya seiring dengan adanya globalisasi dalam perdagangan ekonomi antar negara, mengakibatkan terjadinya transaksi dalam mata uang yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan perbedaan <i>rate</i> dalam setiap nilai transaksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengambil data berupa data primer dan sekunder yaitu hasil wawancara dengan pihak PT XYZ serta <i>annual report</i> perusahaan.

## Perancangan Sistem Informasi Verifikasi Berkas Digital Pensiun pada Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.LIS.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2016
<b>Pengarang</b>	Listia Utami
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk merancang aplikasi verifikasi berkas digital berbasis <i>web</i> pada Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar. Proses pengurusan berkas, pendaftaran, penerimaan status berkas kadang kala dirasa tidak efektif, sehingga penulis mencoba membuat suatu rancangan aplikasi verifikasi berkas digital. Model pengujian yang digunakan untuk menguji kesalahan pemrograman adalah metode pengujian <i>BlackBox</i> .

**Tinjauan Normatif Sistem Informasi Debitur sebagai Sistem untuk Mengelola Risiko Hukum Perbankan**

***(The Normative Evaluation of Debtor Information System as a System for Managing Bank Legal Risk)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	658.4038.YOG.t
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Sistem Informasi dan Data Regional
<b>Penerbit</b>	-
<b>Pengarang</b>	Yogi Wiryono
<b>Tahun Terbit</b>	-
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini berjudul Tinjauan Normatif Sistem Informasi Debitur (SID) sebagai Sistem untuk Mengelola Resiko Hukum Perbankan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin signifikannya fungsi bank sebagai intermediasi kredit bagi masyarakat sehingga dalam pemberian kredit prinsip kehati-hatian harus diutamakan guna meminimalisir terjadinya risiko kredit dan risiko hukum. Hanya perbankan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan sistem informasi debitur.

# **TATA RUANG DAN ANALISIS SOSIAL EKONOMI REGIONAL**

**BUKU**

## Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.BAD.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang
<b>Pengarang</b>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang
<b>Tahun Terbit</b>	2014
<b>Tipe File</b>	Buku
<b>Deskripsi</b>	Publikasi Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2013 merupakan salah satu publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang dalam rangka mengimplementasikan fungsi dan tugas pokok Badan Pusat Statistik Kota Semarang, yaitu menyebarkan informasi statistik kepada masyarakat. Publikasi ini merupakan publikasi analisis umum kegiatan ekonomi.

## Analisis Sosial Ekonomi Provinsi Banten 2019

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.9598.BID.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
<b>Pengarang</b>	Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Buku
<b>Deskripsi</b>	Publikasi analisis ini menyajikan data dan informasi terkini mengenai kondisi perekonomian, ketenagakerjaan, kemiskinan, ketimpangan pembangunan, dan kualitas pertumbuhan ekonomi, serta berbagai hal yang berkaitan dengannya, seperti inflasi, investasi, ekspor-impor, produksi tanaman padi, nilai tukar petani, dan upah kerja.

## Pembangunan Ekonomi Regional

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	339.5.RID.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Pustaka Puitika
<b>Pengarang</b>	Ridwan
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Buku
<b>Deskripsi</b>	Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkannya terbatas. Ilmu Ekonomi Regional (IER) atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Sebetulnya sangat sulit meletakkan posisi ilmu ekonomi regional dalam kaitannya dengan ilmu lain, terutama dengan ilmu bumi ekonomi ( <i>economic geography</i> ). Hal inilah yang menyebabkan banyak buku ilmu ekonomi regional tidak memberikan definisi tentang ilmu tersebut.

## Tentang Analisis Sosial

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	301.LEO.t
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Centre for Innovation Policy & Governance (CIPG)
<b>Pengarang</b>	Leonardus Kristianto Nugraha Yanuar Nugroho
<b>Tahun Terbit</b>	-
<b>Tipe File</b>	Buku
<b>Deskripsi</b>	“Pengalaman adalah guru terbaik”, begitu pepatah bijak mengatakan. Dalam hal ini, proses ‘mengalami’ dalam aneka kegiatan merupakan tahapan yang penting untuk memberi kesempatan bagi seseorang untuk merasakan suatu hal secara intens. Dalam daur belajar pengalaman berstruktur, ‘mengalami’ menjadi langkah pertama sebelum peserta mengungkapkan pengalaman tersebut, mengolah dan menganalisis data berdasarkan pengalaman tersebut, menyimpulkan dan menerapkan, sebelum kembali ‘mengalami’. Dalam konteks analisis sosial, ‘mengalami’ pun mendapat tempat yang istimewa.

# JURNAL

**Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi, dan Kebijakan Pembangunan Jakarta  
(Agglomeration, Socio-Economic Changes, and Development Policy of Jakarta)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.ARI.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
<b>Pengarang</b>	Ariesy Tri Mauleny
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Perpaduan pembangunan Jakarta dan daerah sekitarnya secara alami berawal dari aglomerasi yang didorong oleh konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi yang meliputi aspek ruang, tingkat komunitas, skala kota, dan kawasan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan keterkaitan antara aglomerasi, pertumbuhan, dan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah metode estimasi regresi data panel <i>fixed effect</i> menggunakan data kota/kabupaten administrasi di Jakarta tahun 2008-2013.

**Analisa Pengembangan Ekowisata Wilayah Konservasi *Mangrove*, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.**  
**(*Analysis of Development Eco-tourism Mangrove Conservation Area, Bedono Village, Sayung, Demak*)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	639.99.MOH.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Diponegoro Journal Of Maquares (Management of Aquatic Resources)
<b>Pengarang</b>	Moh Toriq Abidin Djoko Suprpto Agus Hartoko
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pariwisata merupakan salah satu potensi utama di Kabupaten Demak. Ekowisata di Desa Bedono mempunyai potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Selain itu, ekowisata ini secara langsung memiliki manfaat pelestarian alam dan lingkungan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Namun kenyataannya, ekowisata ini belum terkelola secara maksimal, sehingga pengembangan kawasan ini sangat perlu dilakukan.

## **Analisis Aktor Implementasi dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	711.4.RIZ.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Journal of Public Policy and Management Review
<b>Pengarang</b>	Rizky Fajar Wibowo Dewi Rostyaningsih
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Memasuki era globalisasi diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang terlaksananya pembangunan. Semakin berkembangnya pembangunan perumahan di wilayah Kota Semarang, maka akan semakin luas kebutuhan akan lahan sebagai sarana bagi pembangunan perumahan yang bersangkutan. Permasalahan alih fungsi lahan yang makin marak di Kota Semarang, bencana tanah longsor Trangkil, peningkatan lahan kritis dan banyaknya ruang terbuka hijau yang dialihfungsikan.

## **Analisis Dampak Reklamasi Teluk Banten terhadap Kondisi Lingkungan dan Sosial Ekonomi (Studi Kasus: Kecamatan Bojonegara)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	627.5.VIO.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Planesa
<b>Pengarang</b>	Violita Liyubayina
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sebagai provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten memiliki daya tarik tersendiri sehingga menyebabkan tingginya angka migrasi dan menciptakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan perekonomian salah satunya kegiatan industri. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Serang, Kecamatan Bojonegara diarahkan sebagai arahan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) pada bidang pelayanan permukiman, industri, pariwisata dan sebagainya. Arahan tersebut menjadikan kegiatan industri di Kecamatan Bojonegara semakin pesat terutama di daerah pesisir sehingga menimbulkan kegiatan reklamasi untuk memenuhi kebutuhan ruang.

**Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan *Mix Use* di Kecamatan Jabon**

***(Analysis of the Social and Economic Impact Policy Mix Use Development in Subregion Jabon)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.ISN.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)
<b>Pengarang</b>	Isna Fitria Agustina Ricka Octaviani
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan analisis kebijakan pengembangan kawasan <i>mix use</i> Jabon, dari penyusunan kebijakan, penetapan kebijakan, hingga implementasi dan evaluasi kebijakan. Penelitian ini juga untuk memaparkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan pengembangan kawasan <i>mix use</i> Jabon. Menggunakan penelitian kualitatif, dengan jumlah informan sebanyak enam orang.

**Analisis Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2015-2019 dengan Metode Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan *Location Quotient***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.RAD.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal: AKSARA
<b>Pengarang</b>	Raden Annisa Dzikri Nur Hidayah Amandus Jong Tallo
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Tengah telah meningkat dari waktu ke waktu. Namun, peningkatan tersebut tidak terjadi di seluruh kabupaten maupun kota secara merata. Studi ini dilakukan sebagai upaya dalam mengetahui kondisi pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Tengah periode 2019, sehingga dapat memberi gambaran terhadap masyarakat, pemerintah maupun lembaga lainnya terhadap kondisi perekonomian terkini di Provinsi Jawa Tengah.

## Analisis Kajian Sosial Ekonomi Pembangunan dan Perluasan Toserba "X"

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.DES.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi)
<b>Pengarang</b>	Desfitriady Tatang Kusmayadi
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami masyarakat di Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan perkembangan dan perluasan toko ritel (Toserba) "X". Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sebagai dasar analisis dan interpretasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah <i>cluster</i> dengan metode <i>simple random sampling</i> dan <i>purposive sampling</i> , artinya sampel yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang merupakan data primer dan data sekunder.

## Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang (Studi tentang Analisis RTRW di Kota Malang)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	711.5.SUY.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ketahanan Pangan
<b>Pengarang</b>	Suyeno Retno Wulan Sekarsari
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang wilayahnya. Kota Malang dalam melaksanakan hal tersebut mengacu pada RTRW Kota Malang tahun 2010-2030. Rencana ini merupakan perbaikan dari kebijakan sebelumnya yang mengalami beberapa penyimpangan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini telah sesuai dengan rencana peruntukkannya untuk kawasan pemukiman, perindustrian dan perdagangan, dan fasilitas umum. Namun untuk ketersediaan ruang terbuka hijau masih belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan.

## Analisis Keterkaitan Regional Kabupaten/Kota dalam Pembentukan Klaster Pengembangan Ekonomi Wilayah Provinsi Aceh (Pendekatan Analisis Spasial)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.ZED.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah
<b>Pengarang</b>	Zedi Saputra Said Muhammad Sofyan Syahnur
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kebijakan desentralisasi di Aceh tidak menunjukkan pencapaian indikator sosial ekonomi yang lebih baik untuk Aceh. Kesenjangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh juga menjadi salah satu indikator belum optimalnya kebijakan desentralisasi. Kerja sama daerah antar kabupaten/kota melalui <i>Aceh Trade and Distribution Center (ATDC)</i> merupakan salah satu program Pemerintah Aceh untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi Aceh dalam 30 tahun ke depan.

## **Analisis Ketersediaan Pelayanan Fasilitas Sosial Ekonomi di Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana**

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	362.12.AND.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	JEP (Jurnal Ekonomi Pembangunan)
<b>Pengarang</b>	Andi Muh. Syaifullah Ahmad Ld. Samsul Barani
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan sosial (fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan) dan bagaimana ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan.

## Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.HER.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Trikonomika
<b>Pengarang</b>	Herwin Mopangga
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi, ketidakseimbangan pembangunan akibat ketidakseimbangan proporsional dalam PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Pengeluaran Infrastruktur, bentuk hubungan perkembangan dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi serta untuk memberikan rekomendasi kebijakan. Analisis yang digunakan adalah <i>Williamson Index</i> , <i>Gini Ratio</i> , <i>Shift-Share</i> , <i>Klassen Typhology</i> dan <i>Regression of Unbalanced Panel</i> .

## Analisis Kinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	339.5.PAT.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Media Litbang Sulteng
<b>Pengarang</b>	Patta Tope
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Pembangunan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong tidak terlepas dari perkembangan indikator makro. Perkembangan kinerja indikator makroekonomi Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan optimisme ke arah yang lebih baik. Artinya dari kecenderungan yang berlangsung, dan berdasarkan indikator ekonomi sudah ada sinyal positif perbaikan ekonomi. Indikasi ini dapat dilihat pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sudah cukup tinggi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis indikator sosial ekonomi daerah, untuk melihat perkembangannya dari tahun ke tahun.</p>

**Analisis Pengembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**(Analysis of Regional Economic Development in Hulu Sungai Selatan Regency)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.DEW.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Kebijakan Pembangunan
<b>Pengarang</b>	Dewi Siska
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Pengembangan wilayah merupakan bagian dari upaya suatu wilayah untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, di antaranya penurunan kesenjangan yang terjadi antar wilayah dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di wilayah tersebut. Tujuan tulisan ini yaitu menggali kondisi pengembangan ekonomi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu kabupaten di Kawasan Andalan Kandungan dan sekitarnya. Penelitian ini dikaji secara deskriptif kualitatif dengan metode kuantitatif, berdasarkan data sekunder yang diambil dari BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian di analisis menggunakan analisis <i>entropy</i>.</p>

## Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.9598.PUT.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)
<b>Pengarang</b>	Puti Andiny Pipit Mandasari
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data Produk Regional Domestik Bruto (PDRB), kemiskinan dan ketimpangan pembangunan Provinsi Aceh tahun 2006-2015. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, hal ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh.

## **Analisis Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat di Wilayah Kota Semarang dalam Pengembangan Industri Kreatif**

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.9598.ART.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Riptek
<b>Pengarang</b>	Artiningsih Rukuh Setiadi Duhita Mayangsasri
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Persaingan global dan menipisnya cadangan sumber daya alam semakin mendorong negara-negara di dunia untuk mencari alternatif perekonomian yang tidak bergantung pada alam. Salah satu alternatif yang ditempuh adalah dengan mengalihkan pilihan pada ekonomi kreatif, yaitu perekonomian yang berbasis pada kreativitas dan kemampuan intelektual.

**Analisis Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Pengaruh Regional, Spesialisasi Daerah, dan Keunggulan Kompetitif Ekonomi Sektoral di Kabupaten Aceh Jaya**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	020.6 .REZ.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Litbang Sukowati
<b>Pengarang</b>	Reza Septian Pradana
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang akan dijadikan prioritas pembangunan daerah berdasarkan pengaruh regional, spesialisasi daerah, dan keunggulan kompetitif ekonomi sektoral di Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan analisis model <i>shift share</i> dan analisis inferensia dengan metode regresi linear berganda.

## Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi pada Tingkat Kecamatan di Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.9598.ANG.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Kajian Ekonomi
<b>Pengarang</b>	Anggi Ade Saputri
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini mengambil judul Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Kota di Kabupaten Empat Lawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kotamadya mana yang termasuk dalam kategori pusat pertumbuhan ekonomi, mengetahui interaksi antar kotamadya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan pedalamannya, serta mengetahui spesialisasi produk unggulan daerah masing-masing kota dengan melihat komoditas unggulannya.

## Analisis Sektor Basis dan Potensi Ekonomi di Kabupaten Deli Serdang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.MAR.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Nommensen
<b>Pengarang</b>	Marlina Mahdalena Parulian Simanjuntak Nancy Nopeline
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dengan mengukur laju perubahan sektor-sektor ekonomi terhadap Pendapatan Domestik Bruto Daerah tersebut. Perkembangan pembangunan ekonomi daerah sangat tergantung pada kondisi dan potensi sumber daya masing-masing daerah.

## Analisis Sektor Ekonomi Potensial dan Interaksi Wilayah Kota Cilegon Tahun 2007 - 2011

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.ARI.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ekonomika dan Manajemen
<b>Pengarang</b>	Aris Wahyu Kuncoro Budi Rahardjo
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor-sektor ekonomi mana yang paling strategis untuk dikembangkan dan menganalisis keterkaitan-keterkaitan Kota Cilegon dengan daerah di sekitarnya sehingga saling menunjang pertumbuhan ekonominya. Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan bahan kajian tentang perkembangan perekonomian. Populasi dalam penelitian ini adalah PDRB sektoral Kota Cilegon dan Provinsi Banten yang dihitung berdasar harga konstan 2000.

## Analisis Sosial dan Ekonomi Kemiskinan di Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	362.5.EKA.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ekonomi Pembangunan
<b>Pengarang</b>	Eka Roostartina
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Fenomena kemiskinan tidak dapat dihindari, walaupun pembangunan telah mengurangi jumlah penduduk miskin namun belum mampu menghapuskan kemiskinan. Sudah saatnya dilaksanakan program pengentasan kemiskinan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, karena faktor penyebab kemiskinan masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga penanggulangan kemiskinan juga bervariasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner langsung kepada responden, sampel diambil menggunakan rumus Slovin.

**Analisis Sosial Ekonomi dalam Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan untuk Berobat Jalan di Provinsi Jawa Barat: Analisis Data Susenas Tahun 2017**  
*(Social Economic Analysis in Utilizing Health Facilities for Outpatient Treatment in West Java Province: Susenas Data Analysis, 2017)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	362.12.FAI.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal MKMI
<b>Pengarang</b>	Fairuz Rabbaniyah Mardiati Nadjib
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pada tahun 2008-2014 pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan di Indonesia mengalami penurunan. Menurut data BPS, pada tahun 2008 pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan sebesar 33,4%, pada tahun 2012 sebesar 30% dan pada tahun 2014 sebesar 27,1%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas kesehatan untuk berobat jalan di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017.

**Analisis Sosial Ekonomi Pengolahan Gondorukem dan Terpentin  
(Socio-economic Analysis of Rosin and Turpentine Processing)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.SET.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Buletin Penelitian Hasil Hutan
<b>Pengarang</b>	Setiasih Irawanti Hendro Prahasto Dwi Astuti
<b>Tahun Terbit</b>	1997
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kegiatan pengolahan gondorukem dan terpentin dapat menciptakan nilai tambah, membuka kesempatan kerja dan mengembangkan kegiatan ekonomi lain yang terkait. Hal ini mendorong dilakukannya analisis sosial ekonomi pekerja produksi, kemitraan antara Perhutani dengan Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Swasta dan nilai tambah yang dihasilkan oleh PGT Perhutani dan PGT Swasta.

**Analisis Sosial-Ekonomi Rotan Tanaman Jawa**  
***(A Socio-economics Analysis of Rattan Plantation in Java)***

**Kode Klasifikasi DDC**

633.5.SET.a

**Sektor**

Tata Ruang dan Penanganan Bencana

**Sub-Sektor**

Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional

**Penerbit**

Buletin Penelitian Hasil Hutan

**Pengarang**

Setiasih Irawanti  
Hariyanto Dwiprabowo

**Tahun Terbit**

1996

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Rotan sebagai bahan baku dalam pembuatan produk jadi rotan di Jawa sebagian besar (sekitar 95%) berasal dari hutan alam di luar Pulau Jawa. Perkebunan rotan Jawa telah didirikan oleh Perum Perhutani sejak tahun 1983 sebagian besar di hutan produksi. Untuk meningkatkan manfaat hutan di pulau terpadat ini, budidaya rotan dapat memberikan dan solusi alternatif. Kajian ini bertujuan untuk memberikan beberapa analisis sosial ekonomi perkebunan rotan untuk melihat kelayakan sosial ekonominya berdasarkan survei di lapangan maupun dari data sekunder.

## Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.BAM.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan
<b>Pengarang</b>	Bambang Prishardoyo
<b>Tahun Terbit</b>	2008
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya dengan menjalin kemitraan antara pemerintah daerah dan pengusaha swasta, sehingga merangsang kegiatan ekonomi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan ada jangkauan baru yang lebih luas di bidang pekerjaan. Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Sektor apa yang menjadi basis Kabupaten Pati dari tahun 2000 hingga 2005? (2) Bagaimana peran Kabupaten Pati dan daerah lainnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.</p>

**Analisis Tipologi Daerah Berdasarkan Indikator Fundamental Ekonomi  
(*Regional Typology Analysis Based on Fundamental Economic Indicators*)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.VIV.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Kebijakan Pembangunan
<b>Pengarang</b>	Vivi Ukhwatu Khasanah Masbiran
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu sasaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat. Penentuan daerah yang menjadi prioritas pembangunan untuk pencapaian indikator kinerja makronya merupakan hal yang sangat penting dalam sektor pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi kabupaten/kota di Sumatera Barat selama periode 2010-2018 sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan daerah prioritas pembangunan untuk mewujudkan pemerataan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif.</p>

## Efisiensi dan Efektivitas Tata Ruang Area Pahat pada Perancangan Pusat Pelatihan Seni Ukir di Jepara

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	711.5.RAl.e
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur
<b>Pengarang</b>	Raissa Vedayanti Noviani Suryasari Abraham M. Ridjal
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pusat Pelatihan Seni Ukir di Mulyoharjo Jepara merupakan salah satu cara pemerintah Jepara untuk menyiasati minimnya tingkat regenerasi pengrajin ukir yang ada di Jepara. Perancangan Pusat Pelatihan Seni Ukir direncanakan berada pada sentra-sentra ukir agar kegiatan ini dapat diawasi oleh seluruh masyarakat ukir di sana. Salah satu sentra ukir berpotensi adalah Desa Mulyoharjo yang terkenal dengan sentra ukir relief dan patung. Salah satu kebutuhan ruang pada pusat pelatihan ini adalah area pahat patung yang memerlukan area terbuka dan luas.

## Evaluasi Kebijakan Ekonomi Regional Jawa Timur dengan Pendekatan Analisis Kluster Lapangan Usaha dan Industri

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.MOH.e
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Eko-Regional
<b>Pengarang</b>	Mohtar Rasyid
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Salah satu isu penting dalam pembangunan ekonomi daerah adalah pemetaan potensi ekonomi berdasarkan kriteria ekonomi yang relevan. Selama ini pemetaan ekonomi lebih sering didasarkan pada aspek pertumbuhan (PDB) saja tanpa menyertakan berbagai aspek atau variabel lain yang relevan. Dengan menggunakan kasus perekonomian Jawa Timur, tulisan ini bertujuan untuk memetakan wilayah sektor industri potensial secara simultan dengan menggunakan beberapa indikator seperti jumlah perusahaan, tenaga kerja, nilai input, dan pajak pertambahan nilai.

**Evaluasi Kegiatan Sosialisasi dan Pelembagaan Analisis Sosial Ekonomi dan Gender (SAGA) dalam Litkaji Lingkup Litbang Pertanian**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	630.205.RIT.e
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian
<b>Pengarang</b>	Rita Nur Suhaeti Edi Basuno
<b>Tahun Terbit</b>	2003
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Evaluasi kegiatan SAGA dalam Penelitian dan Pengkajian di Badan Litbang Pertanian. Tingkat adopsi teknologi yang relatif rendah oleh <i>end users</i> telah memicu penerapan pendekatan partisipatif, teknologi berorientasi <i>user</i> dan lebih memperhatikan aspek sosial <i>user</i> . Pembentukan Tim Inti (SCT) Analisis Sosial Ekonomi dan Gender (SAGA) merupakan inisiasi program sosialisasi dan pelembagaan di lingkungan Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan). Tujuan utama dari program ini adalah untuk membangun kapasitas SAGA dari para peneliti dan penyuluh di Badan Litbang Pertanian.

## Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tolitoli

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	711.5.ZUB.e
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	SMARTek
<b>Pengarang</b>	Zubair Butudoka
<b>Tahun Terbit</b>	2005
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Kecenderungan penyimpangan terhadap tata ruang yang telah ditetapkan dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik produk tata ruang maupun pada tahapan implementasi. Pemantauan dan evaluasi terhadap produk rencana tata ruang yang telah ada sangat diperlukan untuk melihat apakah produk rencana tata ruang tersebut berjalan sesuai dengan pemanfaatannya atau telah terjadi penyimpangan. Melalui metode <i>survey</i> dan pemetaan data dihimpun, diolah, dan dianalisis untuk memantau besarnya penyimpangan yang terjadi antara kondisi realitas dan rencana yang telah disusun pada produk RTRW pada lokasi pemantauan.</p>

## Evaluasi Penataan Ruang Kawasan Pengrajin Keramik Berwawasan Lingkungan Perilaku di Kelurahan Dinoyo, Kota Malang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	711.5.ADH.e
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	PAWON: Jurnal Arsitektur
<b>Pengarang</b>	Adhi Widyarthara Didiek Suharjanto Hamka
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pengrajin keramik memiliki aktivitas yang spesifik yakni membuat dan menjual produk keramik, kegiatan tersebut membutuhkan ruang yang tertata dengan baik agar proses produksinya lebih efektif dan efisien. Keberadaan ruang yang saat ini digunakan untuk tempat produksi maupun ruang pameran merupakan alih fungsi ruang, yang dulu merupakan bagian dari rumah tinggal, saat ini difungsikan secara optimal dan kondisi ini merupakan produk rancangan tata ruang oleh masyarakat.

## Identifikasi Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	711.5.DAR.i
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Planesa
<b>Pengarang</b>	Darmawan Listya Cahya Dwi Suci Lestari
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Mendapatkan pelayanan bidang penataan ruang yang berkualitas merupakan hak semua masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun sejauh ini pelayanan tersebut belum sepenuhnya diperoleh oleh masyarakat NTT, kurangnya transparansi pemerintah serta birokrasi yang sulit menjadi penghalang untuk terealisasinya <i>Good Governance</i> . Pemberian pelayanan bidang penataan ruang sangat penting bagi masyarakat, untuk memberikan informasi serta pengetahuan tentang penataan ruang.

## Implementasi Kebijakan Pemekaran Daerah dalam Mendukung Integrasi Nasional di Kabupaten Luwu Timur

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	711.5.RIF.i
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Administrasi Publik
<b>Pengarang</b>	Rifdan
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahapan implementasi kebijakan pemekaran daerah, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pemekaran daerah, menganalisis wujud implementasi kebijakan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya, serta menganalisis implementasi kebijakan pemekaran daerah dalam mendukung integrasi nasional di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian eksploratif ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui, observasi, wawancara dan dokumen.

## Implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Penyediaan Ruang Terbuka Hijau) di Kota Tegal

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	713.NOV.i
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Journal of Public Policy and Management Review
<b>Pengarang</b>	Novi Listianti Sundarso Kismartini dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kebijakan ruang terbuka hijau dilatarbelakangi oleh berbagai hal di antaranya dorongan kebutuhan ruang publik dan terjaganya ekosistem lingkungan perkotaan. Ruang terbuka hijau juga merupakan fasilitas umum yang mengandung banyak fungsi kehidupan masyarakat kota seperti kebutuhan tempat untuk interaksi sosial, sarana olahraga, dan ruang rekreasi.

**Kajian Paduserasi Tata Ruang Daerah (TRD) dengan Tata Guna Hutan (TGH)**  
*(Study on Synchronization of Regional Spatial and Forest Land Use)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	634.92.EPI.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
<b>Pengarang</b>	Epi Syahadat Hariyatno Dwiprabowo
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan adalah suatu kajian terhadap aturan main dalam pelaksanaan paduserasi rencana tata ruang daerah dengan tata guna hutan, dasar hukum, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan struktur ruang daerah sesuai dengan rencana pembangunan/pengembangan daerah. Kajian paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan berorientasi terhadap aspek-aspek utama dan pendukung yang menyebabkan keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan paduserasi tata ruang daerah dengan tata guna hutan.

## Kajian Perencanaan Tata Ruang Partisipatif untuk Menunjang Kegiatan Non-Pertanian di Kecamatan Wonosalam Demak

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	711.5.RIZ.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Teknik PWK
<b>Pengarang</b>	Rizka Fadhilah Adnin Agung Sugiri
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kemiskinan dapat dipandang sebagai bagian dari masalah pembangunan. Keberadaannya ditandai dengan pengangguran dan ketidakmampuan yang akan meningkatkan kesenjangan sosial. Sektor non-pertanian di pedesaan dapat membantu orang miskin pedesaan untuk mengurangi kemiskinan mereka dengan industri skala mikronya. Kegiatan ini sering beroperasi di sektor informal, namun pengembangannya sering kurang didukung oleh kebijakan tata ruang terkait.

**Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten dan Pekotaan: Studi Kasus Provinsi Banten**  
***(Policy of Green Open Space Utilization of Regencies and Cities: Case Study in Banten Province)***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	713.EPI.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Analisis Kebijakan
<b>Pengarang</b>	Epi Syahadat Sylviani
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau. Penyediaan RTH merupakan permasalahan dalam bentuk penataan ruang terutama dalam hal pembebasan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan mengenai pembangunan dan pemanfaatan RTH yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian teknis terkait. Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah secara kualitatif deskriptif berdasarkan <i>desk study</i> dan tinjauan lapangan di Provinsi Banten.

## Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Penggunaan Lahan Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Semarang Timur

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	711.5.SUA.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Geodesi Undip
<b>Pengarang</b>	Suardi Lubis Andri Suprayogi Hani'ah
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota telah menyusun Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Mengingat kebutuhan yang semakin mendesak sejalan dengan tingkat perkembangan kota-kota di Indonesia terutama kota sedang, kota besar, dan metropolitan. Untuk dapat mengefektifkan pelaksanaannya, diperlukan suatu Aturan Pola Pemanfaatan Ruang ( <i>Zoning Regulation</i> ).

## Konsep Arsitektur Berkelanjutan pada Tata Ruang Kota (Study Kasus: Peralihan Fungsi Lahan Hijau Menjadi Perumahan)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	711.4.EDD.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	MODUL
<b>Pengarang</b>	Eddy Dermawan Haryanto
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Semarang yang merupakan ibukota Jawa Tengah menjadi kota yang memiliki tingkat kepadatan cukup tinggi. Kepadatan ini berimbas pada tata ruang kota, yaitu perubahan tata ruang kota. Tata ruang Kota Semarang telah ditetapkan dalam Rancangan Tata Ruang dan Wilayah penelitian ini diharapkan dapat menjadi <i>guideline</i> dalam rangka rencana pengembangan perumahan di Kota Semarang, memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran untuk mempertegas kebijakan pemerintah akan tata ruang Kota Semarang dalam hal ini pengembangan perumahan khususnya.

## Konsep Tata Ruang Rumah Tinggal Masyarakat Kuta Desa Karangpaning Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	711.5.RIA.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Patanjala
<b>Pengarang</b>	Ria Intani T.
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian konsep tata ruang rumah tinggal ini membahas mengenai bentuk rumah, penggunaan bahan bangunan dan cara membangun, aturan dalam tata letak rumah dikaitkan dengan keberadaan rumah lainnya, tata letak rumah dalam suatu areal, arah hadap rumah, pembagian ruang, dan aturan-aturan lain yang terkait yang menyertainya. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai konsep tata ruang rumah tinggal di Kampung Kuta. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif, dengan tahapan kerjanya meliputi: studi pustaka, observasi, dan wawancara.

## Konsepsi Pola Tata Ruang Pemukiman Masyarakat Tradisional pada Hotel *Resort* di Toyabungkah Kintamani

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	711.5.KAD.k
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur
<b>Pengarang</b>	Kade Praditya S. Empuadji Abraham M. Ridjal Chairil B. Amiuza
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Toyabungkah yang berada di Kabupaten Bangli memiliki potensi wisata yang belum dapat dimaksimalkan karena kurangnya ketersediaan akomodasi wisata yang memadai. Padahal, Toyabungkah memiliki potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tujuan wisata peristirahatan, karena Toyabungkah berada di kawasan pegunungan di tepi Danau Batur. Untuk mengembangkan daya tarik wisata peristirahatan di Toyabungkah, dibutuhkan sebuah hotel <i>resort</i> sebagai akomodasi pendukung pengembangan pariwisata.

## Manajemen Tata Ruang (Penataan Ruang Terbuka Hijau) di Kabupaten Kendal

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	713.RAT.m
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Journal of Public Policy and Management Review
<b>Pengarang</b>	Ratri Mardikowati Dyah Hariani Maesaroh
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pertambahan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tekanan terhadap pemanfaatan lahan. Menurutnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka publik yang telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan. Untuk membangun lingkungan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan serta mengajak semua pihak berpartisipasi menjaga sumber daya alam yang ada dengan melakukan penataan ruang terbuka hijau.

## Metodologi Analisis Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi-AR sebagai Alat Bantu Perencanaan Jaringan Jalan yang Berkeadilan

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	003.SLA.m
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal HPJI (Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia)
<b>Pengarang</b>	Slamet Muljono
<b>Tahun Terbit</b>	2017
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pengembangan jaringan infrastruktur jalan bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan. Untuk merancang strategi yang tepat sesuai dengan tujuannya, perlu untuk diukur besarnya efek <i>multiplier</i> pembangunan infrastruktur jalan untuk dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji penggunaan metodologi pengukuran <i>multiplier</i> dengan model analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Antar-Regional (SNSE-AR).

## Optimalisasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bekasi Melalui Perjanjian Pemanfaatan Ruang Berbasis Regulasi Hijau

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	713.FIT.o
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
<b>Pengarang</b>	Fitri Dwi Ratnasari Imam Koeswahyono
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Persentase ruang terbuka hijau eksisting di Kabupaten Bekasi saat ini masih mencapai angka 11,86% sedangkan dalam Pasal 23 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 – 2031 persentase ruang terbuka hijau harus memenuhi minimal 30% dari luas wilayah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik minimal 20% dan ruang terbuka hijau privat minimal 10%, sehingga dalam hal ini pemerintah harus melakukan upaya optimalisasi ruang terbuka hijau.

## Pemaknaan terhadap Prinsip dan Pola Ruang pada Istana Maimoon

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	729.NIN.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur
<b>Pengarang</b>	Nindy Adhyaksa Chairil B Amiuza Abraham M Ridjal
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Sebagai salah satu elemen terpenting dalam perancangan arsitektur penempatan sebuah ruang juga melalui pertimbangan tertentu yang membentuk suatu pola tata ruang. Dalam pola penataan tersebut setiap susunan ruang memiliki maksud tertentu sehingga hal tersebut dapat dibaca melalui bahasa tanda. Istana Maimoon adalah peninggalan kebudayaan Melayu di Kota Medan yang harus dijaga kelestariannya.

## **Pembuatan Aplikasi Tata Ruang Tiga Dimensi Gedung Serba Guna Menggunakan Teknologi *Virtual Reality* (Studi Kasus: Graha ITS Surabaya)**

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.5.ULL.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Teknis ITS
<b>Pengarang</b>	Ully Asfari Bambang Setiawan Nisfu Asrul Sani
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Pada bidang pemasaran dan periklanan di perusahaan saat ini cenderung menampilkan gambar 2D dalam penyampaian informasi kepada pengguna. Gambar 2D yang sering kita tahu berfungsi sebagai media penyampaian informasi. Misal informasi tentang suatu tata ruang, namun informasi yang dapat disajikan hanya dari sisi-sisi tertentu saja. Untuk itu, dibutuhkan tampilan visual yang dapat menggambarkan tata ruang suatu bangunan dalam bentuk 3D.

## Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	362.5.AGU.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah
<b>Pengarang</b>	Agustien Sendouw Vekie A. Rumaté Debby Ch. Rotinsulu
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Kemiskinan merupakan masalah klasik di setiap negara. Usaha pengentasan kemiskinan telah lama dilakukan oleh pemerintah. Variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain adalah pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah Kota Manado melalui pos belanja modal, belanja sosial, dan pertumbuhan ekonomi diharapkan juga memberi pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

## Pengaruh Belanja Pemerintah dan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep

**Kode Klasifikasi DDC**

338.9598.ALW.p

**Sektor**

Tata Ruang dan Penanganan Bencana

**Sub-Sektor**

Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional

**Penerbit**

Jurnal "Performance" Bisnis&Akuntansi

**Pengarang**

Alwiyah

**Tahun Terbit**

2014

**Tipe File**

Jurnal

**Deskripsi**

Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sumenep. Pembangunan sesungguhnya adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah pembangunan perekonomian daerah. Perekonomian daerah dapat dilihat dari gambaran Produk Domestik Regional Bruto baik berdasarkan harga konstan maupun harga berlaku. Selain itu perekonomian daerah dapat dilihat dari tingkat inflasi, investasi, pajak dan retribusi, pinjaman daerah, dana perimbangan, atau sumber penerimaan daerah lainnya.

## Pengaruh Modal Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia: Analisis Data Susenas 2009

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.9598.BAM.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	KINERJA
<b>Pengarang</b>	Bambang Suryanggono
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal sosial terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi di Indonesia.

## Pengaturan Pembuatan Surat Izin Tempat Berdasarkan Konsep Tata Ruang Perkotaan

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	711.4.MER.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Mendapo: Journal of Administrative Law
<b>Pengarang</b>	Meri Puspita Sari Arrie Budhiartie Ivan Fauzani Raharja
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Jambi adalah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan yang bersifat konkuren. Tugas dari dinas ini ialah memberikan pelayanan terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non-perizinan di Kota Jambi. Dalam pembuatan Surat Izin Tempat Usaha khususnya izin usaha pada hiburan umum yang memanfaatkan ruang perkotaan harus berdasarkan konsep dari tata ruang perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pengembangan Sistem Informasi Geografis Menggunakan Konsep *Participatory GIS* dalam Manajemen Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	005.36.NIZ.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Teknologi dan Informasi
<b>Pengarang</b>	Nizar Rabbi Radliya Rauf Fauzan Hani Irmayanti
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Manajemen tata ruang wilayah Kabupaten Bandung telah diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yakni Perda Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016. Saat ini belum ada fasilitas yang dapat digunakan sebagai media penyebaran informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) supaya mudah diakses oleh masyarakat yang akan memanfaatkan ruang di wilayah Kabupaten Bandung. Penyebaran informasi tentang RTRW menjadi sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan wilayah oleh masyarakat.

## Pengesahaan Perda Tata Ruang dalam Menajaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	348.598.FEN.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Legalitas
<b>Pengarang</b>	Fence M Wantu
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Peraturan daerah terhadap tata ruang di Provinsi Gorontalo sangat berarti bagi lingkungan hidup ke depan daerah ini sendiri. Keberanian dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk mengesahkan draf rancangan peraturan daerah merupakan komitmen yang ditunggu-tunggu masyarakat.

## Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	711.5.ADR.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya
<b>Pengarang</b>	Adrianus Zega
<b>Tahun Terbit</b>	2010
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Rencana penggunaan lahan ditujukan untuk rencana penggunaan lahan umum dan rencana penggunaan lahan rinci. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan lahan mulai dari perencanaan penggunaan lahan, memfungsikan, dan mengatur fungsi penggunaan lahan.

## Perancangan Tata Ruang Hunian Vertikal Ditinjau dari Sistem Pembuangan Air Limbah Bangunan The Suites @Metro Bandung

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	628.4.THE.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Reka Karsa
<b>Pengarang</b>	Theresia Pynkyawati Zeila Sifa Rosa TB Gaia C Montana dkk.
<b>Tahun Terbit</b>	2016
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Perkembangan kota dapat dilihat dari tingkat pembangunan yang sedang berlangsung, termasuk infrastruktur fungsi hunian. Namun terkadang pembangunan infrastruktur ini juga dapat menjadi suatu permasalahan yang kompleks. Permasalahan yang terjadi ialah keterbatasan lahan pada kawasan urban, dan solusi yang dapat dilakukan dari keterbatasan lahan ini dengan membuat hunian vertikal.

**Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi**  
*(Problems on Forest and Land Use System for Revision of Provincial Land Use System)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	634.92.EPI.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
<b>Pengarang</b>	Epi Syahadat Subarudi
<b>Tahun Terbit</b>	2012
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) dan kabupaten/kota (RTRWK) sangat terkait dengan penataan dan keberadaan kawasan hutan. Penyusunan RTRWP masih menyisakan persoalan terkait dengan penyelesaian yang berlarut-larut terhadap usulan revisi dari beberapa pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, kajian tentang permasalahan RTRWP ini menjadi penting dan relevan untuk membantu penyelesaiannya. Tujuan dari kajian ini adalah menelaah kebijakan penataan ruang yang ada, mengidentifikasi permasalahannya dan menyusun strategi penyelesaian masalahnya.

**Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia: Peran Infrastruktur, Modal Manusia dan Keterbukaan Perdagangan**  
*(Regional Economic Growth in Indonesia: The Role of Infrastructure, Human Capital and Trade Openness)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.AND.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Buletin Studi Ekonomi
<b>Pengarang</b>	Andi Kustanto
<b>Tahun Terbit</b>	2020
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Studi ini membahas tentang analisis dampak pembangunan infrastruktur, modal manusia dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia menggunakan metode data panel. Model yang dibangun berdasarkan model pertumbuhan Solow dengan menggunakan infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur kesehatan, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan keterbukaan perdagangan di 34 provinsi di Indonesia.

## Sistem Tata Suara pada Bandara Studi Kasus Bandara Ahmad Yani Semarang

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	629.1.AGU.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	MODUL
<b>Pengarang</b>	Agung Dwiyanto
<b>Tahun Terbit</b>	2011
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Perencanaan tata suara pada bangunan umum biasanya diaplikasikan sebagai sistem tanda bahaya, sistem informasi, yang ditempatkan pada ruangan-ruangan bangunan tersebut. Maka dari itu penempatan jaringan tata suara harus sangat diperhatikan agar dapat berfungsi secara maksimal. Tujuan <i>paper</i> ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem jaringan tata suara pada suatu bangunan didesain dan dirancang secara khusus sehingga daya dukung kinerja dapat seoptimal mungkin. Karena dalam merencanakan suatu bangunan atau gedung, utilitas bangunan menjadi hal yang mendasar, sehingga memerlukan perencanaan yang matang.</p>

## Struktur dan Tata Ruang Sosial Budaya Suku Bangsa Yokari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	305.8.MAI.s
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Ekologi Birokrasi
<b>Pengarang</b>	Mais Maikel Yaroseray
<b>Tahun Terbit</b>	2018
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	<p>Suku di Papua rata-rata memiliki struktur sosial dan tata ruang kebudayaan beraneka ragam yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Sistem yang mengatur hubungan atau relasi antara warga dalam berbagai aktivitas hidupnya sehari-hari berdasarkan kebudayaan mereka masing-masing, yaitu sistem politik atau sistem kepemimpinan politik tradisional. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan etnometodologi studi lapangan. Penelitian dilakukan di Distrik Yokari pada kebudayaan suku bangsa Yokari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.</p>

***The Economic Growth and the Regional Characteristics: The Case Indonesia***

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.YES.t
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Bulletin of Monetary, Economics and Banking
<b>Pengarang</b>	Yesi Hendriani Supartoyo Jen Tatuh Recky H. E. Sendouw
<b>Tahun Terbit</b>	2013
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Jurnal ini menganalisis karakteristik daerah dan pertumbuhan output.

## Transformasi Tata Ruang dan Elemen Linear Vertikal Masjid Jawa pada Perancangan Museum Islam Nusantara

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	726.2.BAY.t
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur
<b>Pengarang</b>	Bayu Arga Dewantara Noviani Suryasari Indyah Martiningrum
<b>Tahun Terbit</b>	2015
<b>Tipe File</b>	Jurnal
<b>Deskripsi</b>	Perancangan Museum Islam Nusantara dilatarbelakangi oleh tidak adanya sarana untuk melestarikan dan mempelajari sejarah dan budaya Islam Nusantara di Indonesia. Diperlukan sebuah sarana edukasi-pariwisata yang dapat memberitahu masyarakat tentang bagaimana Islam masuk dan berkembang hingga sekarang menjadi agama terbesar di Indonesia. Dalam perancangan sebuah bangunan simbolik tentu diperlukan suatu ciri khas yang dapat menginterpretasikan tentang tema arsitektural tersebut.

# **RINGKASAN KAJIAN**

## **Analisis Kluster Belanja Sosial, Belanja Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat**

<b>Kode Klasifikasi <i>DDC</i></b>	338.9598.BUD.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Prosiding Seminar Nasional Pakar ke-2 Tahun 2019
<b>Pengarang</b>	Budi Santosa Sumiyarti
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pola pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan analisis kluster. Dalam konteks itu, pertumbuhan ekonomi diformulasikan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh belanja sosial dan ekonomi di masing-masing daerah. Selanjutnya, penelitian ini juga ingin melihat efek dari dua pengeluaran ini bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di setiap daerah.

## Analisis Potensi Ekonomi di Kabupaten Bone (Kajian Produk Domestik Regional Bruto)

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	338.9598.SRI.a
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar
<b>Pengarang</b>	Sri Hardianti
<b>Tahun Terbit</b>	2019
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif/spesialisasi, keunggulan kompetitif dan tergolong sektor yang progresif di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan data sekunder (runtun waktu) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang terdiri dari data PDRB Kabupaten Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan 2010 tahun 2013-2017. Analisis data dengan menggunakan Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), <i>Overlay</i> serta Tipologi Klassen.

**Perkembangan Sosial Ekonomi Kabupaten Siak pada Era Pemekaran Derah Tahun 2000 - 2014**  
*(Socio Economic Development District Siak on Regional Expansion in 2000 - 2014)*

<b>Kode Klasifikasi DDC</b>	.AST.p
<b>Sektor</b>	Tata Ruang dan Penanganan Bencana
<b>Sub-Sektor</b>	Tata Ruang dan Analisis Sosial Ekonomi Regional
<b>Penerbit</b>	Doctoral dissertation, Riau University
<b>Pengarang</b>	Astrilla Ridwan Tugiman
<b>Tahun Terbit</b>	-
<b>Tipe File</b>	Ringkasan Kajian
<b>Deskripsi</b>	Tidak meratanya pembangunan serta kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat menyebabkan Kabupaten Siak yang dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis memutuskan untuk melepaskan diri dan membentuk kabupaten baru. Pemekaran Kabupaten Siak dari Kabupaten Bengkalis pasti menimbulkan perkembangan terhadap kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. Di bidang sosial-ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan pendapatan.



***Kementerian PPN  
Bappenas***